



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2014 NOMOR 21

---

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN  
PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan dan untuk mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium, khususnya target 7C sektor air minum dan sanitasi, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Magelang Tahun 2011-2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Magelang Tahun 2011-2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian *Target Millennium Development Goals (RAD-MDGs)*;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011-2015.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, dan air laut yang berada di darat.
6. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.

7. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
9. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan khususnya dalam hal penyediaan air minum yang layak dan penyehatan lingkungan.
10. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan Daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium, khususnya pada target 7C perihal proporsi penduduk dengan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan pada 2015.
11. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Pokja AMPL adalah Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Magelang yang beranggotakan SKPD terkait dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan fungsi sebagai wadah atau forum komunikasi dibidang pembangunan air minum dan sanitasi dan bertujuan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah pelaku pembangunan air minum dan sanitasi.
12. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
13. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
14. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
15. Indikator Tujuan Pembangunan Milenium untuk peningkatan akses air minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan.
16. Indikator Tujuan Pembangunan Milenium untuk peningkatan akses sanitasi adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan.

17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
18. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 (enam puluh) liter/orang/hari.
19. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60% (enam puluh persen), dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5% (lima persen).
20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
21. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
22. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
23. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
24. Strategi adalah langkah-langkah mendasar berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

27. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
28. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
29. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah program nasional penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang dananya berasal dari kontribusi masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Bank Dunia.
32. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
34. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
35. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

RAD AMPL Kabupaten Magelang 2011-2015 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat mulai Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium.

### Pasal 3

RAD AMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
- d. acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; dan
- e. acuan jumlah desa replikasi program PAMSIMAS minimal untuk Tahun 2012 dan Tahun 2013.

### Pasal 4

- (1) RAD AMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan RPJMD untuk mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium 2015 dan target SPM bidang air minum Tahun 2014 dan SPM bidang sanitasi Tahun 2014
- (2) RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015.

## BAB III PENYUSUNAN RAD AMPL

### Pasal 5

- (1) RAD AMPL disusun dalam bentuk buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I       PENDAHULUAN
  - BAB II       ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN  
PENCAPAIAN TARGET 7C MDGS
  - BAB III      PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RAD AMPL  
2011-2015
  - BAB IV      PEMANTAUAN DAN EVALUASI
  - BAB V       PENUTUP

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 6

RAD AMPL dilaksanakan melalui:

- a. RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Magelang; dan
- b. integrasi dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

### Pasal 7

Pelaksanaan RAD AMPL yang menggunakan dana dari luar APBD dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait.

### Pasal 8

- (1) Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL terbuka bagi sumber-sumber pendanaan di luar APBD dan APBN.
- (2) Pendanaan dari sumber-sumber pendanaan di luar APBD dan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2015, perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 10

Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD AMPL dilakukan dua kali dalam satu tahun yaitu pada Bulan Juli dan Bulan Desember.



## Pasal 11

Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi program RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
- b. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- c. Kepala SKPD melalui Tim Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;
- d. Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Pokja AMPL;
- e. Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;
- f. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
- g. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

## Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Pokja AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 13

Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 16 Juni 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang  
Tahun 2014 Nomor 21  
pada tanggal 16 Juni 2014

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA

**RENCANA AKSI DAERAH  
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN  
LINGKUNGAN KABUPATEN MAGELANG  
(RAD-AMPL)  
TAHUN 2011-2015**

## DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Kondisi Umum Pembangunan Daerah Berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Milenium di Daerah .....	4
1.2.1 Status Capaian Kinerja Pelayanan Air Minum dan Sanitasi.....	6
1.2.2 Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Magelang.....	16
1.2.3 Hasil Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah yang Berimplikasi pada Kebutuhan .....	29
1.2.4 Perkiraan Kebutuhan Investasi Pelayanan AMPL Daerah.....	31
1.3 Permasalahan dan Tantangan. ....	36
1.3.1 Isu Strategis Kabupaten Magelang dalam Pencapaian Target AMPL 2015.....	40
1.3.2 Isu Strategis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Magelang.....	40
BAB 2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET 7C MDGS.....	42
2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL 2015 .....	42
2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Target AMPL 2015 ...	44
BAB 3. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RAD AMPL 2011-2015	45
3.1 Program Pengembangan SPAM .....	45
3.2 Program Pengembangan Kapasitas Sistem Air Minum.....	46
3.3 Program Penurunan Kebocoran Air Minum.....	47
3.4 Program Peningkatan Penerapan PHBS.....	47
3.5 Program Penyediaan Kebutuhan Sanitasi.....	47
3.6 Program Pengelolaan Lingkungan .....	49
3.7 Program Pengembangan BPSPAMS .....	49
BAB 4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	60
BAB 5. PENUTUP.....	64

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2010 Beserta Proyeksinya Pada 2015 Menurut Kecamatan.....	5
Tabel 2	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang .....	7
Tabel 3	Target SPM Air Minum Per Provinsi Tahun 2015 .....	8
Tabel 4	Target SPM Sanitasi Per Provinsi Tahun 2015 .....	8
Tabel 5	Cakupan Penduduk Kabupaten Magelang dengan Akses Air Minum Aman Tahun 2010 .....	9
Tabel 6	Cakupan Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Magelang Tahun 2010.....	10
Tabel 7	Status Kinerja AMPL Kabupaten Magelang.....	11
Tabel 8	Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2010.....	12
Tabel 9	Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2010..	12
Tabel 10	Tingkat Pelayanan PDAM Tirta Gumilang Kabupaten Magelang Tahun 2010 .....	14
Tabel 11	Capaian cakupan penduduk dengan akses air minum .....	16
Tabel 12	Tingkat Pelayanan Air Minum Kabupaten Magelang Tahun 2010 Berdasarkan Penyelenggara Pelayanan .....	23
Tabel 13	Gambaran Pelayanan Air Minum dengan Sistem Jaringan Perpipaan di Kabupaten Magelang Tahun 2010 .....	23
Tabel 14	Tingkat Konsumsi Air Minum Kabupaten Magelang Tahun 2010 .....	25
Tabel 15	Gambaran Tingkat Kebocoran Air Minum Pada Pelayanan Sistem Jaringan Perpipaan di Kabupaten Magelang Tahun 2010.....	26
Tabel 16	Tarif Pelayanan Air Minum Kabupaten Magelang Tahun 201 .....	28
Tabel 17	Perkiraan Kebutuhan Investasi Air Minum Kabupaten Magelang sd 2015.....	34
Tabel 18	Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi .....	35
Tabel 19	Proyeksi Jumlah Penduduk dengan Akses Air Minum Layak .....	40
Tabel 20	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Magelang sampai dengan Tahun 2015.....	41

Tabel 21 Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah Kabupaten Magelang Tahun 2011 - 2015 .....	43
Tabel 22 Matriks Program Prioritas RAD AMPL Kabupaten Magelang 2011-2015.....	50
Tabel 23 Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL 2011-2015 .....	62

# **BAB 1. PENDAHULUAN**

---

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Pada tahun 2010 lalu, Pemerintah Indonesia menerbitkan sejumlah kebijakan yang sangat mendukung percepatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi, antara lain Instruksi Presiden No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan (mencakup program Pro Rakyat, Keadilan untuk Semua, Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No 0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals (RAD-MDGs).

Berdasarkan kebijakan tersebut, peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas nasional sampai dengan 2015 mendatang. Dalam rangka memenuhi tanggungjawab pelaksanaan prioritas nasional tersebut, Kabupaten Magelang menyusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 2011-2015 sebagai instrument percepatan daerah dalam mencapai target Millennium Development Goals, khususnya target 7C (air minum dan sanitasi) dan instrument pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Air Minum dan Air Limbah sesuai Permen PU No 14/PRT/M/2010.

RAD AMPL Kabupaten Magelang Tahun 2011-2015 merupakan dokumen daerah yang berfungsi sebagai:

- Rencana peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan
- Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah 2011 - 2015
- “Channel” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL
- Acuan alokasi anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL
- Acuan pelaksanaan replikasi program PAMSIMAS

Penerapan RAD AMPL diharapkan memberikan hasil nyata bagi Kabupaten Magelang yaitu dalam hal meningkatnya cakupan akses dan kualitas pelayanan air

minum dan sanitasi daerah sesuai target SPM dan target 7C MDGs 2015 dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat yang lebih baik.

Ruang lingkup RAD AMPL mencakup:

1. Penyediaan air minum rumah tangga
2. Peningkatan cakupan penduduk yang menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun dan bebas buang air besar sembarangan
3. Pengelolaan air limbah
4. Pengelolaan limbah rumah tangga
5. Penanganan pengelolaan kebersihan makanan

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai “channel” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, maka program kunci RAD AMPL adalah program-program yang berhubungan dengan:

1. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat
2. Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak
3. Program pemecuan perubahan perilaku (PHBS)
4. Program pengelolaan lingkungan
5. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat

Sistematika RAD AMPL mengikuti sistematika Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Bappenas melalui Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) No 0445/M.PPN/11/2010. Pada RAD-AMPL, ditambahkan komponen penulisan yang memudahkan Pemda untuk mengintegrasikan program dan kegiatan dalam RAD-AMPL ke dalam dokumen resmi perencanaan dan penganggaran daerah.

Sistematika RAD AMPL adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan;** mengemukakan kondisi umum pembangunan Kabupaten Magelang

1.1 Latar Belakang

1.2 Kondisi Umum Pembangunan Daerah Berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Milenium di Daerah

1.2.1 Status Capaian Kinerja Pelayanan Air Minum dan Sanitasi



- 1.2.2 Kondisi Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) Saat Ini
- 1.2.3 Hasil Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah yang Berimplikasi pada Kebutuhan Pelayanan AMPL
- 1.2.4 Perkiraan Kebutuhan Investasi Pelayanan AMPL Daerah
- 1.3 Permasalahan dan Tantangan
  - 1.3.1 Isu Strategis Kabupaten Magelang dalam Pencapaian Target AMPL 2015
  - 1.3.2 Isu Strategis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

**Bab II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs;** mengemukakan:

- 2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL 2015
- 2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Target AMPL 2015

**Bab III Program dan Kegiatan Prioritas RAD AMPL 2011-2015;** mengemukakan program dan

- 3.1. Program Pengembangan SPAM
- 3.2. Program Pengembangan Kapasitas Sistem
- 3.3. Program Penurunan Kebocoran Air Minum
- 3.4. Program Peningkatan PHBS
- 3.5. Program Penyediaan Kebutuhan Sanitasi
- 3.6. Program Pengelolaan Lingkungan
- 3.7. Program Pengembangan BPSPAMS

**Bab IV Pemantauan dan Evaluasi;** mengemukakan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk

- 4.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL
- 4.2. Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

**Bab V Penutup;** mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung RAD AMPL, termasuk menggalang partisipasi dari berbagai pihak.

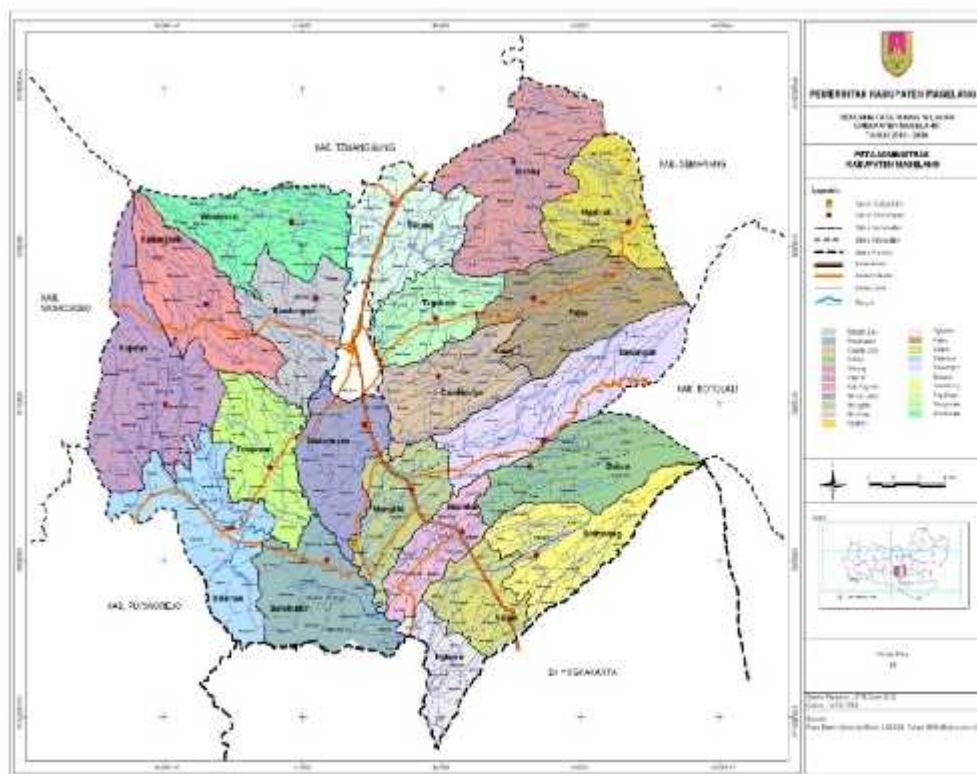
**Lampiran Matriks RAD AMPL 2011-2015**

## 1.2 KONDISI UMUM PEMBANGUNAN DAERAH BERKAITAN DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM DI DAERAH

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang secara administratif termasuk dalam bagian dari Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Magelang terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak di antara 110° 01' 51" sampai dengan 110° 26' 28" Timur dan antara 7° 19' 13" sampai dengan 7° 42' 16" Lintang Selatan.

Secara fisik administrasi Kabupaten Magelang mempunyai luas wilayah 1085.73 km<sup>2</sup>. Wilayah Kabupaten Magelang terdiri atas 21 Kecamatan dan terdiri dari 367 desa serta 5 kelurahan.

Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Magelang



Adapun batas wilayah Kabupaten Magelang secara administratif adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Boyolali
- Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
- di tengah-tengah : Kota Magelang

Perkembangan kependudukan di Kabupaten Magelang dapat dilihat dari jumlah, perkembangan dan penyebaran penduduk, kepadatan serta komposisi penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun nampak terus bertambah. Dari data kependudukan jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Magelang pada tahun 2010 memiliki kepadatan rata-rata sebesar 1.089 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan yang tertinggi yaitu di Kecamatan Muntilan sebesar 2.616 jiwa/ km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan yang terendah yaitu di Kecamatan Kajoran dengan tingkat kepadatan 617 jiwa/ km<sup>2</sup>.

Penduduk di Kabupaten Magelang pada umumnya menempati wilayah yang memiliki pelayanan yang lebih baik dibandingkan wilayah lain. Wilayah tersebut adalah Kecamatan Muntilan, Mertoyudan, Grabag, dan Secang. Selain memiliki fasilitas yang lebih lengkap, keempat kecamatan tersebut berada di daerah perbatasan yang secara tidak langsung menarik penduduk untuk menempati kecamatan tersebut, karena keterjangkauan dengan wilayah yang tingkat hirarkinya lebih tinggi dan perlintasan jalur jalan nasional.

- Kecamatan Muntilan berbatasan dengan Kabupaten Sleman
- Kecamatan Mertoyudan berbatasan dengan Kota Magelang
- Kecamatan Grabag berbatasan dengan Kabupaten Semarang
- Kecamatan Secang berbatasan dengan Kabupaten Temanggung

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2010, beserta proyeksi pada tahun 2015, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun untuk masing-masing Kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2010 Beserta Proyeksinya Pada 2015 Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2010	Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2015	Rata-rata Pertumbuhan/Tahun
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Salaman	65.871	67.726	0,56
2	Borobudur	55.563	56.863	0,47
3	Ngluwar	29.866	30.332	0,31
4	Salam	44.488	45.679	0,53
5	Srumbung	44.827	46.753	0,86
6	Dukun	42.931	44.184	0,58
7	Muntilan	74.843	76.990	0,57
8	Mungkid	68.682	71.561	0,84
9	Sawangan	53.624	55.266	0,61

10	Candimulyo	45.367	46.821	0,64
11	Mertoyudan	104.934	109.893	0,94
12	Tempuran	46.434	47.829	0,60
13	Kajoran	51.508	51.776	0,10
14	Kaliangkrik	52.310	53.582	0,48
15	Bandongan	54.533	55.845	0,48
16	Windusari	46.305	48.092	0,77
17	Secang	74.713	78.365	0,98
18	Tegalrejo	53.195	55.286	0,78
19	Pakis	52.255	52.782	0,20
20	Grabag	81.533	83.372	0,45
21	Ngablak	37.941	37.645	-0,16
	<b>Total</b>	<b>1.181.723</b>	<b>1.216.642</b>	

Sumber : BPS, Hasil Sensus Penduduk Kab. Magelang, 2010

### 1.2.1 Status Capaian Kinerja Pelayanan Air Minum dan Sanitasi

Target 7C Tujuan Pembangunan Millennium adalah: menurunkan **hingga separuhnya** proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak pada 2015

Untuk mengukur pencapaian target 7C tersebut, indikator yang digunakan adalah:

1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan :
  - a. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak- perkotaan;
  - b. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak-perdesaan.
2. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan :
  - a. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak-perkotaan;
  - b. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak-perdesaan.

Dalam Tujuan Pembangunan Millennium, definisi operasional akses air minum layak adalah yang menggunakan sumber air minum layak seperti sambungan air minum rumah tangga, standpipes, lubang bor, sumur gali yang terlindungi, mata air

terlindung, tampungan air hujan. Sedangkan definisi operasional akses sanitasi layak adalah yang menggunakan sanitasi dasar seperti toilet guyur/toilet siram-guyur atau jamban, pipa saluran pembuangan, tangki septik atau jamban lubang, jamban cemplung dengan ventilasi yang baik, jamban cemplung dengan segel slab, atau toilet/jamban kompos.

Selanjutnya, SPM air minum 2014 menyatakan bahwa indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari. Sedangkan SPM sanitasi 2014 menyatakan bahwa indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai (dengan target SPM 60%) dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota (dengan target SPM 5%).

Definisi akses aman terhadap air minum, berdasarkan data BPS biasanya terdiri dari:

- Air ledeng meteran
- Sumur pompa/bor dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar
- Sumur terlindungi dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar
- Mata air terlindungi dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar, dan
- Air Hujan

SPM tingkat pelayanan air limbah setempat diukur dari jumlah penduduk dengan tangki septic dan terlayani IPLT terhadap jumlah penduduk yang menggunakan tangki septic. Sedangkan SPM tingkat pelayanan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota diukur dari jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala kawasan terhadap jumlah penduduk di kab/kota.

**Tabel 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang**

Bidang/Sektor	Cluster Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai	
Air Minum	Sangat buruk	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60/l/org/hari	40%	2014
	Buruk		50%	
	Sedang		70%	
	Baik		80%	
	Sangat Baik		100%	
Sanitasi	Air Limbah Permukiman	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	60%	
		Tersedianya air limbah skala komunitas/kawasan/kota	5%	

**Tabel 3 Target SPM Air Minum Per Provinsi Tahun 2015**

Provinsi	Target SPM Air Minum (%)	Provinsi	Target SPM Air Minum (%)
Nanggroe Aceh Darussalam	50.00	Bali	75.00
Sumatera Utara	71.00	Nusa Tenggara Barat	70.00
Sumatera Barat	70.00	Nusa Tenggara Timur	70.00
Riau	70.00	Kalimantan Barat	72.00
Jambi	71.00	Kalimantan Tengah	52.00
Sumatera Selatan	70.00	Kalimantan Selatan	70.00
Bengkulu	50.00	Kalimantan Timur	73.00
Lampung	70.00	Sulawesi Utara	70.00
Kep. Bangka Belitung	52.00	Sulawesi Tengah	70.00
Kep. Riau	50.00	Sulawesi Selatan	70.00
DKI Jakarta	50.00	Sulawesi Tenggara	74.00
Jawa Barat	70.00	Gorontalo	70.00
Jawa Tengah	75.00	Sulawesi Barat	70.00
DI Yogyakarta	80.00	Maluku	71.00
Jawa Timur	73.00	Maluku Utara	70.00
Banten	45.00	Papua Barat	70.00
		Papua	50.00

*Sumber: Bappenas, 2011*

**Tabel 4 Target SPM Sanitasi Per Provinsi Tahun 2015**

Provinsi	Target SPM Sanitasi (%)	Provinsi	Target SPM Sanitasi (%)
Nanggroe Aceh Darussalam	65.00	Bali	90.00
Sumatera Utara	65.00	Nusa Tenggara Barat	65.00
Sumatera Barat	65.00	Nusa Tenggara Timur	65.00
Riau	65.00	Kalimantan Barat	65.00
Jambi	65.00	Kalimantan Tengah	65.00
Sumatera Selatan	65.00	Kalimantan Selatan	65.00
Bengkulu	65.00	Kalimantan Timur	67.00
Lampung	65.00	Sulawesi Utara	79.00
Kep. Bangka Belitung	74.00	Sulawesi Tengah	65.00
Kep. Riau	65.00	Sulawesi Selatan	70.00
DKI Jakarta	90.00	Sulawesi Tenggara	65.00
Jawa Barat	65.00	Gorontalo	65.00
Jawa Tengah	68.00	Sulawesi Barat	65.00
DI Yogyakarta	90.00	Maluku	65.00
Jawa Timur	65.00	Maluku Utara	65.00
Banten	69.00	Papua Barat	65.00
		Papua	65.00

Sumber: Bappenas, 2011

Dengan demikian, pembangunan sektor air minum dan sanitasi di Kabupaten Magelang harus dapat berkontribusi dalam mencapai target SPM Provinsi Jawa Tengah baik untuk air minum maupun untuk air limbah.

Perkembangan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi/penyehatan lingkungan (AMPL) Kabupaten Magelang dalam tiga tahun terakhir (2008-2010) ditampilkan pada Tabel 7. Data terakhir menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Magelang selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, namun masih kurang jika dibandingkan dengan capaian provinsi dan capaian nasional.

Apabila ditinjau dari sebaran desa-kota, penduduk di **perdesaan** yang telah mengakses **air minum layak** baru sekitar **45,01 %** dari jumlah penduduk perdesaan. Sedangkan di **perkotaan**, penduduk yang telah mengakses **air minum layak** telah mencapai **88,31 %** dari jumlah penduduk di perkotaan.

Tinjauan cakupan akses **sanitasi** di perdesaan dan perkotaan menunjukkan penduduk di **perdesaan** yang telah mengakses sanitasi layak baru sekitar **60,39 %** dari jumlah penduduk perdesaan. Sedangkan di **perkotaan**, penduduk yang telah mengakses sanitasi layak telah mencapai **76,26 %** dari jumlah penduduk di perkotaan.

Meskipun status kinerja air minum dan sanitasi Kabupaten Magelang telah cukup baik dibandingkan capaian provinsi Jateng dan rata-rata nasional 2009, namun kinerja ini masih perlu peningkatan agar minimal sama dengan target SPM Jawa Tengah 2014. **Target SPM Provinsi Jawa Tengah** adalah **75%** untuk **air minum** dan **68%** untuk **sanitasi**.

Tabel 5 Cakupan Penduduk Kabupaten Magelang dengan Akses Air Minum Aman Tahun 2010

Sistem	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Jumlah Penduduk Terlayani (jiwa)	(%) Thd Penduduk Perkotaan	Jumlah Penduduk Terlayani	(%) Thd Penduduk Perdesaan	Jumlah Penduduk Terlayani	(%) Thd Penduduk Kab/Kota
Jaringan Perpipaan	81.829	45,52	129.715	12,95	211.544	17,90
PDAM	76.590	42,60.	73.168	7,30	149.758	12,67
Non PDAM	4.760	2,65	20.346	2,03	25.106	2,12
Berbasis Masyarakat	479	0,27	36.201	3,61	36.680	3,10
Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi	76.934	42,79.	321.267	32,06	398.201	33,70
Jumlah	158.763	88,31	450.982	45.01 %	609.745	51,60

Sumber: BPS SP 2010 dan PDAM

**Tabel 6 Cakupan Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Magelang Tahun 2010**

<b>No</b>	<b>Jenis Modul</b>	<b>Jumlah Modul</b>	<b>Jumlah Jiwa Terlayani</b>	<b>% Jiwa thd Jumlah Penduduk Perkotaan</b>	<b>% Jiwa thd Jumlah Penduduk Perdesaan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	Air kemasan	693	2.564	1,47 %	0,26 %
2	Sumur terlindungi	107.622	398.201	21,50 %	39,74 %
3	Sumur tak terlindungi	17.375	64.287	35,76 %	6,42 %



**Tabel 7 Status Kinerja AMPL Kabupaten Magelang**

No	Indikator	Capaian Kabupaten Magelang			Capaian Provinsi			Capaian Nasional			Target Kab. Magelang	Target SPM Jateng	Target MDGs-Indonesia
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2015	2014	2015
1	Proporsi penduduk) dengan akses air minum yang layak (%)	45,42	47,71	51,60		58,00		46,50	47,71		75,80	75,00	68,87
	Perkotaan			88,31		60,00		50,20	49,82		94,16		75,29
	Perdesaan			45,01		56,00		43,00	45,72		72,51		65,81
2	Proporsi penduduk dengan akses sanitasi yang layak (%)	49,90	55,19	62,81		54,00		48,60	51,19		81,40	68,00	62,41
	Perkotaan			76,26		67,00		66,70	69,51		88,13		76,82
	Perdesaan			60,39		41,00		31,40	33,96		80,20		55,55

**Tabel 8** Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2010

No	Kecamatan	PDAM	Sumur Bor	Sumur Terlindung	Mata Air Terlindung	Air Hujan
1	Salaman	1.577		8.202	1.257	
2	Borobudur	826		9.008	95	
3	Ngluwar	-		6.444	72	
4	Salam	141		9.755	10	
5	Srumbung	-		3.343	562	
6	Dukun	-		4.011	1.591	
7	Muntilan	3.316		15.736	666	
8	Mungkid	3.156		9.484	2.083	
9	Sawangan	648		695	220	
10	Candimulyo	2.262		1.361	1.885	
11	Mertoyudan	17.423		5.057	2.043	
12	Tempuran	180		6.979	65	
13	Kajoran	275		605	432	
14	Kaliangkrik	17		366	366	
15	Bandongan	644		2.996	2.791	
16	Windusari	-		211	923	
17	Secang	7.650		6.176	945	
18	Tegalrejo	513		7.592	469	
19	Pakis	176		1.201	1.055	
20	Grabag	1.796		6.049	231	
21	Ngablak	-		2.351	355	
	<i>Total</i>	40.600		107.622		

*Sumber: BPS SP 2010 dan PDAM*

**Tabel 9** Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2010

No	Kecamatan	Jamban Sendiri	Jamban Bersama	Jamban Umum	Tidak Ada	Jumlah
1	Salaman	10.786	1.603	535	5.453	18.377
2	Borobudur	10.086	2.202	276	2.825	15.389
3	Ngluwar	5.396	479	102	2.775	8.752
4	Salam	7.835	670	59	3.915	12.479
5	Srumbung	6.617	755	148	4.874	12.394
6	Dukun	5.237	668	1.134	5.486	12.525
7	Muntilan	12.929	1.234	658	5.611	20.432
8	Mungkid	12.269	704	476	5.082	18.531
9	Sawangan	8.758	1.530	819	4.359	15.466
10	Candimulyo	7.930	1.715	477	2.046	12.168
11	Mertoyudan	24.123	1.825	538	1.503	27.989
12	Tempuran	7.320	1.043	584	3.031	11.978
13	Kajoran	6.692	1.093	1.443	5.132	14.360
14	Kaliangkrik	7.795	1.207	3.230	1.516	13.748
15	Bandongan	8.233	744	1.954	3.645	14.576
16	Windusari	6.344	1.273	2.716	1.375	11.708
17	Secang	14.673	1.393	998	2.378	19.442
18	Tegalrejo	8.646	1.227	381	1.900	12.154
19	Pakis	8.031	2.939	1.622	1.373	13.965
20	Grabag	14.874	2.965	1.355	2.416	21.610
21	Ngablak	6.016	2.132	2.106	687	10.941
	<i>Total</i>	200.590	29.401	21.611	67.382	318.984

*Sumber: BPS, SP 2010*



**Tabel 10 Tingkat Pelayanan PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Tahun 2010**

No	STATUS PDAM	JUMLAH PENDUDUK 2010 (JIWA)			CAKUPAN PELAYANAN (JIWA)			KAPASITAS PERKOTAAN (LITER / DETIK)			INDIKASI TK. KEBOCORAN (%)
		PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL	PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL	PRODUKSI	TERPASANG (AIR YG DIDISTRIBUSIKAN)	INDIKASI KAP.IDLE	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9	10	11 = 9 - 10	12
	SEHAT	179.777	1.001.946	1.181.723	110.335	497.288	607.623	470,00	435,958	34,042	7,243

*Sumber: PDAM Kab. Magelang, 2010*

### 1.2.1.1 Perkiraan Target Kinerja AMPL Kabupaten Magelang 2015 berdasarkan SPM dan MDGs

Penetapan target kinerja AMPL 2015 didasarkan pada kesepakatan seluruh pemangku kepentingan di kabupaten/kota. Target kinerja AMPL 2015 ditetapkan dengan mempertimbangkan target SPM kabupaten/kota dan hasil perhitungan/perkiraan target 7C MDGs di kabupaten/kota.

Target SPM air minum 2014 dirumuskan untuk skala kabupaten/kota (tidak dipilah antara perkotaan dan perdesaan). Khusus untuk SPM air minum, kinerja kabupaten/kota minimal naik satu cluster pada 2014. Contoh: jika cakupan penduduk dengan akses air minum yang layak pada 2010 adalah 47% (cluster pelayanan = sangat buruk), maka pada 2014 minimal mencapai 50% (cluster pelayanan = buruk).

Target 7C MDGs (AMPL) di kabupaten/kota dihitung dengan dengan menjumlahkan proporsi penduduk dengan akses pada tahun terakhir dengan setengah dari proporsi yang akan diturunkan sampai dengan 2015. Contoh: jika proporsi penduduk dengan akses sanitasi pada 2009 adalah 55%, maka perkiraan target MDGs 2015 adalah  $55\% + \frac{1}{2} (1-55\%)$  atau 77.5%.

#### 1) Target proporsi penduduk dengan akses air minum yang layak dan berkelanjutan pada 2015

Berdasarkan data **2010**, jumlah penduduk Kabupaten Magelang adalah **1.181.723** jiwa dengan proporsi penduduk yang memiliki akses air minum yang layak dan berkelanjutan adalah **51,60** %. Sehingga masih terdapat **48,40** % penduduk yang belum memiliki akses air minum yang layak dan berkelanjutan. Pada 2015, setengah dari proporsi penduduk yang belum memiliki akses air minum yang layak dan berkelanjutan ini harus mampu diturunkan, yaitu **24,20** % (setengah dari **48,40** %). Dengan demikian, pada 2015, target proporsi penduduk Kabupaten Magelang yang memiliki akses air minum yang layak dan berkelanjutan adalah **75,80** %.

Ditinjau dari SPM Air Minum (Permen PU 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang), status cakupan akses air minum yang aman/layak di Kabupaten Magelang termasuk dalam cluster pelayanan “buruk” dan pada 2014 harus mampu meningkat menjadi setidaknya cluster pelayanan “sedang”. Dengan demikian, berdasarkan SPM 2014, target proporsi penduduk Kabupaten Magelang yang memiliki akses air minum yang aman adalah minimal meningkat satu cluster dan menyamai target SPM Provinsi Jawa Tengah, yaitu **75%**.

Dengan demikian, target 2015 Kabupaten Magelang untuk cakupan akses air minum adalah pada kisaran **75%** sampai dengan **75,80** %.

**2) Target proporsi penduduk dengan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan pada 2015**

Berdasarkan data **2010**, proporsi penduduk yang memiliki akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan adalah **62,81 %**. Sehingga masih terdapat **37,19 %** penduduk yang belum memiliki akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Pada 2015, setengah dari proporsi penduduk yang belum memiliki akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan ini harus mampu diturunkan, yaitu **19,59 %** (setengah dari **37,19 %**). Dengan demikian, pada 2015, target proporsi penduduk Kabupaten Magelang yang memiliki akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan adalah **81,40 %**.

Ditinjau dari **SPM Sanitasi** (Permen PU 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang), status cakupan akses sanitasi yang aman/layak di Kabupaten Magelang (**60,20%**) masih di bawah target SPM Provinsi Jawa Tengah (**68%**).

Dengan demikian, target 2015 Kabupaten Magelang untuk cakupan **akses sanitasi** adalah pada kisaran **68%** sampai dengan **81,40 %**.

**Tabel 11 Capaian cakupan penduduk dengan akses air minum**

No	Indikator	Capaian	Target 7C MDGs Provinsi Jateng	Perkiraan Target 7C MDGs Jateng	Perkiraan Target 7C MDGs-Kab Magelang	Perkiraan Target 7C MDGs Kab Magelang Berdasarkan Target 7C MDGs Provinsi
		2010	2015	2015	2015	2015
(a)	(b)	(f)	(g)	(h)	(i) = f + ½(1-f)	(j) = i x g/h
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak	51.60 %	75%	80.71%	75,80 %	70,43 %
	Perkotaan	88,31 %			94,16 %	87,50 %
	Perdesaan	45,01 %			72,51 %	67,38 %
2	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak	62,81 %	68 %	77 %	81,40 %	71,88 %
	Perkotaan	76,26 %			88,13 %	77,83 %
	Perdesaan	60,39 %			80,20 %	70,83 %

**1.2.2 Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Magelang**

Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum dan akses sanitasi yang layak akan berdampak pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat sehingga tingkat kesejahteraanpun akan rendah. Sering kita jumpai kasus kekurangan/kesulitan air

bersih terjadi pada lingkungan pedesaan dengan tingkat pendapatan rendah. Hal ini bisa disebabkan karena masyarakat tersebut kurang mampu menyediakan infrastruktur pendukung pemenuhan kebutuhan air bersih secara swadaya, atau mungkin juga karena tidak tersedianya sumber mata air yang dekat.

Apabila mengacu target MDG, pada tujuan 7: memastikan kelestarian lingkungan hidup pada Target 10: Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015 maka diperlukan biaya yang besar untuk mencapainya (Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia Per 25 Agustus 2005). Khusus untuk bidang air minum, target 10 diterjemahkan bahwa Kabupaten Magelang diharapkan mampu melayani kebutuhan air minum dengan cakupan 80% untuk penduduk perkotaan sudah terlayani jaringan air minum perpipaan dan untuk pedesaan 70%. Sedangkan untuk sanitasi pada tahun 2015 ditargetkan 80% penduduk kabupaten Magelang sudah memiliki akses sanitasi yang layak.

Keberhasilan pencapaian target tersebut akan sangat bergantung pada banyak hal, diantaranya ketersediaan sumber air dibanding kebutuhan, Rencana dan Kebijakan Daerah, manifestasi dari Rencana dan Kebijakan, kemampuan dan kapasitas kelembagaan yang ada dan tentunya tingkat kemampuan pembiayaan.

Masih relatif rendahnya akses air minum disebabkan oleh rendahnya komitmen Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum, rendahnya kemampuan tekniskeuangan-manajemen PDAM, ketidakjelasan pengaturan investasi air minum yang menyebabkan masih rendahnya keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pembangunan air minum. Selain itu banyak sarana dan prasarana air minum terbangun tidak terpelihara dan tidak berlanjut pengelolaannya. Kondisi di atas semakin rumit dengan tidak tersedianya data yang akurat dan disepakati oleh semua pihak yang berakibat pada kurang optimalnya penetapan kebijakan ((Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia Per 25 Agustus 2005).

Melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) ini diharapkan adanya komitmen bersama seluruh komponen untuk mendukung capaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat Kabupaten Magelang.

Proporsi rumah tangga di Kabupaten Magelang dengan akses ke sumber air minum dan sanitasi layak telah meningkat sebesar 6,18 % dan 12,91 % sejak tahun 2008 s/d 2010. Dengan tingkat kenaikan tersebut, pada 2010 jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses berkelanjutan pada sumber air minum layak dan sanitasi layak mencapai masing-masing 51,60 % dan 62,81 %. Dibandingkan dengan target 70

MDGs Indonesia dan target SPM Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang perlu memberikan perhatian khusus pada upaya peningkatan cakupan akses air minum yang layak dan upaya meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak.

Tinjauan cakupan akses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan pada perdesaan dan perkotaan menunjukkan perlunya perhatian khusus pada kawasan perdesaan yang umumnya penduduk berpenghasilan rendah.

Selain masalah kemiskinan penyebab rendahnya akses air minum dan sanitasi yang layak diantaranya adalah terbatasnya ketersediaan sumber air baku, pencemaran sumber mata air dan banyak sumber mata air permukaan yang mengalami penyusutan maupun kehilangan debit disebabkan meningkatnya tata guna lahan secara keseluruhan dan akibat bencana erupsi gunung Merapi.

Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses ke sumber air minum dan sanitasi layak, sehingga berdampak pada rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat. Sebagai contoh menggunakan air yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, buang air besar sembarangan, pembuangan limbah langsung ke badan air tanpa melalui proses pengolahan dan budaya masyarakat belum terbiasa cuci tangan pakai sabun sebelum makan.

Dari aspek pendanaan, program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan belum menjadi program prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dan masyarakat, sehingga alokasi anggaran untuk bidang AMPL tersebut masih minim.

Dari aspek kelembagaan lemahnya kapasitas lembaga pengelola air minum di masyarakat menyebabkan program keberlanjutan pasca konstruksi menjadi terhambat. Hal tersebut disebabkan tidak adanya pembinaan dari Pemerintah Daerah kepada Badan Pengelola yang ada di masyarakat.

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/*drainase*. Air kemasan dianggap sebagai sumber air minum layak hanya jika rumah tangga yang bersangkutan menggunakannya untuk memasak dan menjaga



kebersihan tubuh, dan di Indonesia penggunaan air kemasan tidak dikategorikan sebagai sumber air minum layak terkait aspek keberlanjutannya.

### **1.2.2.1 Aspek Teknis**

#### **Unit Air Baku**

Di Wilayah Kabupaten Magelang , banyak terdapat sumber air dari mata air yang potensial untuk dimanfaatkan. Pemanfaatannya selama ini dilakukan oleh institusi maupun masyarakat untuk kepentingan irigasi maupun untuk memenuhi kebutuhan air se hari-hari. Sumber air yang ada sebagiannya kuantitas yang cukup untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku PDAM Kabupaten Magelang. Letaknya yang menyebar memungkinkan untuk dimanfaatkan secara parsial untuk melayani daerah-daerah pelayanan tertentu. Sehingga sistem PAM yang terbentuk di PDAM Kabupaten Magelang pun umumnya tidak saling terkait antara satu sub unit pengolahan dengan sub unit pengolahan lainnya. Namun ada juga sebagiannya yang terkonsep secara integral.

Sumber mata air yang dimanfaatkan oleh PDAM sebagai air baku sebanyak 18 sumber mata air dengan jumlah debit air secara keseluruhan sebanyak 2.240 Liter per detik. Dari jumlah debit tersebut yang diambil oleh PDAM sebesar 523,40 Liter / Detik

Disamping PDAM, masih ada sistem perpipaan yang dibangun di perdesaan melalui program Pamsimas dan DAK.. Untuk program Pamsimas sampai dengan Tahun 2010 telah dibangun di 37 desa, sedangkan melalui DAK telah dibangun di 38 desa. Sebagian terbesar dari SAM tersebut menggunakan mata air sebagai sumber air baku. Jumlah debit air yang dimanfaatkan oleh program Pamsimas berjumlah 53 liter/detik.

Sumber air baku yang digunakan pada sistem non perpipaan di Kabupaten Magelang adalah air tanah dan air permukaan. Air tanah sebagai sumber air bersih masyarakat diambil melalui sumur gali dan sumur pompa. Hampir semuanya dimanfaatkan tanpa melalui pengolahan. Sebagian warga masyarakat bahkan memanfaatkan air sungai atau belik sebagai sumber air bersih.

Berdasarkan uji sampel kualitas air permukaan dan air tanah yang dilakukan Dinas Kesehatan, sebagian besar sumber air tersebut telah tercemar oleh bakteri coli. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan air baku sebelum dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.

Selain permasalahan kualitas, kuantitas air yang mengalami fluktuasi pada saat musim hujan dan musim kemarau menjadi permasalahan bagi penyediaan air bersih non perpipaan. Di Kabupaten Magelang terdapat 66 desa rawan air bersih yang antara lain disebabkan karena belum adanya jaringan air bersih dari PDAM maupun swadaya masyarakat, tidak terdapat debit mata air dengan kapasitas yang mencukupi untuk

dimanfaatkan dan terjadinya erupsi gunung Merapi yang menyebabkan berkurangnya debit mata air.

### **Unit Produksi**

Air baku diambil dari beberapa mata air yang dialirkan melalui pipa transmisi air baku PVC diameter 3" – 12" ke ground reservoir kemudian didalam pengolahannya tidak dilakukan dengan sistem pengolahan lengkap hanya diberi desinfeksi yang berfungsi untuk membunuh bakteri dan kuman, proses desinfeksi tersebut menggunakan kaporit.

Dari mata air, belum semua dilengkapi dengan meter induk yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur debit, sehingga kubikasi produksi air yang ditransmisikan dapat terukur, tercatat, dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

### **Unit Distribusi**

Akses terhadap air minum perpipaan di Kabupaten Magelang tahun 2010 untuk wilayah perkotaan sebesar 88,31 % dan wilayah pedesaan 45,01 % dengan asumsi bahwa air minum yang berasal dari perpipaan program PAMSIMAS dan DAK dianggap layak.

Target proporsi penduduk dengan akses air minum layak dan berkelanjutan di Kabupaten Magelang sampai dengan 2015 tercatat 75,80 %. Rencana yang telah disiapkan saat ini membutuhkan penggalakan inisiatif untuk memperluas akses terhadap air minum yang layak baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Perluasan akses air minum yang layak selain melalui PDAM juga melalui beberapa program antara lain PAMSIMAS dan DAK.

### **Unit Pelayanan**

Pelayanan terhadap konsumen yang menjadi penekanan baik dari sisi kualitas, debit maupun tekanan , pada perkembangannya belum dapat terpenuhi sepenuhnya. Hal ini terdapat pada beberapa daerah unit pelayanan yang memiliki tekanan , debit, dan kualitas tidak sesuai dengan yang diharapkan atau dibawah standart dan bersifat kasuistis dari harapan dan keinginan pelanggan. Dan yang masih jauh dari harapan dan keinginan pelanggan adalah waktu beroperasinya PDAM Kabupaten Magelang yang belum beroperasi 24 jam. Apabila keadaan ini berkelanjutan dan tidak segera diantisipasi akan berdampak pada penurunan air terjual maupun jumlah pelanggan yang aktif, serta sulitnya menambah jumlah pelanggan baru.

Lemahnya sosialisasi dan koordinasi PDAM Kabupaten Magelang kepada pelanggan maupun masyarakat umum terhadap produk air minum yang dihasilkan akan

berpengaruh terhadap peningkatan atau penambahan jumlah pelanggan, yang aktif , serta sulitnya menambah jumlah pelanggan, hal ini nampak pada peningkatan jumlah pelanggan maupun air terjual dari tahun ke tahun yang relatif kecil, sedangkan potensi masyarakat yang belum terlayani masih cukup tinggi dan daerah yang belum terlayanipun sudah terlewati jaringan distribusi.

Daerah pelayanan PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang sampai dengan Tahun 2010 dibagi dalam 3 (tiga) unit pelayanan yang terdiri dari 10 sub unit pelayanan yaitu sub unit Mertoyudan, Grabag, Salaman, Secang, Muntilan, Banjarnegoro, Kalinegoro, Tegalrejo dan Candimulyo. Adapun cakupan pelayanan yang dilayani PDAM adalah 40.475 sambungan rumah yang berada di 16 kecamatan (Mungkid, Grabag, Salaman, Borobudur, Secang, Muntilan, Tegalrejo, Kajoran, Kaliangkrik, Mertoyudan, Candimulyo, Pakis, Sawangan, Bandongan, Tempuran, dan Salam).

**Tabel 12 Tingkat Pelayanan Air Minum Kabupaten Magelang Tahun 2010 Berdasarkan Penyelenggara Pelayanan**

No	Penyelenggara	Sistem (Perpipaan atau Non Perpipaan)	Jenis Sumber Air Baku	Kapasitas Sumber Air Baku (l/dt)	Kapasitas Sistem (l/dt)	Kapasitas Pelayanan (Jiwa)	Jumlah Pelanggan/Pemanfaat (Jiwa)	% Jumlah Pelanggan Terhadap Kapasitas Pelayanan	% Jumlah Pelanggan Terhadap Total Penduduk
1	PDAM	Perpipaan	Mata Air	2.055	470	188.000	149.758	79,66	12,67
2	BPSPAMS ...	Perpipaan	Mata Air	53	57,51	34.506	36.680	106,3	3,10

*Sumber: PDAM dan DMAC Kab. Magelang*

**Tabel 13 Gambaran Pelayanan Air Minum dengan Sistem Jaringan Perpipaan di Kabupaten Magelang Tahun 2010**

No	Penyelenggara	Kapasitas Terpasang (l/dt)	Kapasitas Produksi (l/dt)	Produksi Saat Ini (l/dt)	Jumlah Sambungan Kebutuhan Domestik (unit)		Jumlah Sambungan Kebutuhan Non Domestik (unit)			Jam Operasi Pelayanan (jam/hari)
					SR	KU	KU	TA	HU	
1	PDAM		470	470	40.475				125	20
2	BPSPAMS ...	57,51	53	53	6.350	207			145	

*Sumber: PDAM dan DMAC Kab. Magelang*

### Tingkat Konsumsi Air Minum

Tingkat konsumsi air adalah jumlah air yang dikonsumsi pelanggan untuk setiap sambungan dalam waktu tertentu. Tingkat yang akan ditinjau disini dinyatakan dalam satuan m<sup>3</sup> per sambungan pelanggan per bulan. Besaran konsumsi air yang ada di unit pelayanan PDAM Kabupaten Magelang akan dibandingkan dengan satuan kebutuhan air untuk pemakaian yang wajar. Angka yang digunakan sebagai satuan kebutuhan air adalah sebesar 130 liter per orang per hari ( Loh ). Perhitungan konversi ke dalam tingkat konsumsi air adalah sebagai berikut :

- Satuan kebutuhan air = 130 liter / orang / hari
- Untuk jumlah orang per sambungan pelanggan sebanyak 6 orang, maka :
- Tingkat konsumsi air =  $130 \text{ Loh} \times 6 \text{ orang} \times 30 \text{ hari}$   
= 23.400 liter / samb / bulan  
= 23,4 m<sup>3</sup> / samb. / bulan.

Berdasarkan perhitungan PDAM, besarnya tingkat konsumsi air untuk setiap sub. Unit pelayanan, dimana konsumsi terbesar terdapat di sub unit pelayanan Banjarnegoro yaitu sebesar 28,26 m<sup>3</sup> / samb / bln. Sedangkan konsumsi terendah ada di sub unit Muntilan , 16,54 m<sup>3</sup> / samb / bln, Sub unit Candimulyo 16,98 m<sup>3</sup> / samb / bulan. dan sub unit Kalinegoro 17,01 m<sup>3</sup> / samb / bln. Namun secara rata-rata tingkat konsumsi air di ketiga Unit yaitu Unit Mertoyudan, Unit Secang dan Unit Muntilan berada pada tingkat konsumsi yang wajar. Rata-rata untuk se Kabupaten Magelang 21,20 m<sup>3</sup> / samb / bulan. sama dengan 117,78 liter / orang / hari.

Tingkat konsumsi air yang tinggi di sub unit Banjarnegoro, diduga kuat karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Tingginya konsumsi air pelanggan pada perumahan Akmil-Panca Arga.
2. Adanya konsumsi air yang digunakan untuk kolam renang PTTN dimana konsumsi air ini dihitung untuk I ( satu ) buah meter pelanggan, sehingga seolah-olah memunculkan angka konsumsi yang sangat tinggi per sambungannya.
3. Kondisi jaringan distribusi di Banjarnegoro relatif baik dan umumnya memiliki tekanan yang cukup untuk mengalirkan air ke pelanggan. Hal ini turut berkontribusi terhadap tingginya konsumsi air oleh pelanggan.

Sedangkan tingkat konsumsi air yang rendah pada sub unit Muntilan, Candimulyo dan Kalinegoro , kemungkinan disebabkan karena :

1. Umumnya jumlah jiwa persambungan pelanggan yang ada di wilayah ini dibawah 5 jiwa / sambungan, sehingga tingkat pemakaian airnya menjadi rendah untuk setiap sambungannya.
2. Kondisi jaringan distribusi yang ada memiliki keterbatasan dalam mengalirkan air secara kontinyu , terutama di saat-saat pemakaian puncak, sehingga jumlah pemakaian air yang digunakan pelanggan disesuaikan dengan air yang bisa diperolehnya.
3. Tingkat kehilangan air yang terjadi relatif tinggi, yakni di sub unit Muntilan, sehingga secara kuantitas air yang sampai ke pelanggan berada di bawah jumlah pemakaian wajar.
4. Khusus untuk sub unit Kalinegoro, jumlah sambungan pelanggan yang ada sudah terlalu banyak bila dibandingkan jumlah air yang didistribusikan dari sub unit Banjarnegoro dan reservoir Semali, sehingga perbandingan pemakaian airnya terhadap sambungan terpasang menjadi rendah.

**Tabel 14 Tingkat Konsumsi Air Minum Kabupaten Magelang Tahun 2010**

No	Penggunaan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Tingkat Konsumsi Air Minum (liter/orang/hari)	Standard Konsumsi Air Minum (liter/orang/hari)
1	Domestik perkotaan	179.777	117,78	120 – 150
2	Domestik perdesaan	1.001.946	60	60
3	Non domestik		17,67	15% x kebutuhan domestik
Rata-rata			65,15	

### **Tingkat Kebocoran Air**

Kehilangan air yang terjadi bisa disebabkan oleh berbagai hal baik teknis maupun non teknis , namun penyebab potensial yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kehilangan air ini umumnya adalah :

1. Kehilangan air secara fisik pada jaringan pipa transmisi dan distribusi, yang bisa disebabkan karena :
  - Kondisi pipa yang sudah tua sehingga banyak terjadi kebocoran pada sambungan .
  - Jenis pipa seperti ACP ( Asbes Cement Pipe ) yang rentan terhadap kebocoran.
  - Adanya pipa yang pecah akibat getaran dari beban di atasnya.
2. Adanya illegal connection ( sambungan liar )

- Kondisi meter pelanggan yang rusak, kurang baik atau tingkat keakuratannya rendah, sehingga air yang tercatat sebagai air terjual tidak sesuai dengan tingkat pemakaian air yang sesungguhnya.

Kehilangan air semacam ini perlu ditekan melalui program penurunan kebocoran air, sehingga jumlah air yang bisa diselamatkan dapat dimanfaatkan untuk menjamin kuantitas dan kontinuitas air pelanggan, atau bahkan menjadi potensi untuk penambahan pelanggan baru.

Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan baik melalui rehabilitasi jaringan serta pemasangan alat ukur serta perawatan secara rutin atau berkala, diharapkan akan dapat menurunkan kehilangan air dari 29,56% pada akhir Tahun 2010, menjadi 20,56% pada tahun 2015.

Sedangkan untuk SPAM berbasis masyarakat khususnya di perdesaan, karena sistem yang dilaksanakan masih sangat sederhana, maka perhitungan tingkat kehilangan air belum dapat diukur.

**Tabel 15 Gambaran Tingkat Kebocoran Air Minum Pada Pelayanan Sistem Jaringan Perpipaan di Kabupaten Magelang Tahun 2010**

No	Penyelenggara	Kapasitas Terpasang (l/dt)	Kapasitas Produksi (l/dt)	Produksi Saat Ini (l/dt)	Jumlah Distribusi (l/dt)	Jumlah air yang Terjual (l/dt)	Tingkat Kebocoran Air (%)
1	PDAM	523,40	523,40	486,40	486,40	342,61	29,56
2	BPSPAMS ...	57,51	57,51	53	53		

*Sumber: PDAM dan DMAC Kab. Magelang*

### 1.2.2.2 Aspek Non Teknis

#### Kelembagaan

PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 1980, tanggal 1 Desember 1980, tentang pendirian PDAM Kabupaten Magelang yang dirubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kab. Magelang nomor 9 Tahun 1998 dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kab. Magelang nomor 9 Tahun 2001.

Tujuan pendirian PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang adalah ikut serta menunjang pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat, dengan usaha menyediakan air minum yang sehat dan memenuhi syarat bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang serta meningkatkan kesejahteraan pegawai perusahaan.



PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang , mempunyai wilayah cakupan pelayanan meliputi 15 Kecamatan dari total 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang.

Untuk SPAM berbasis masyarakat pengelolaannya diserahkan kepada BPSPAMS yang dibentuk di masing-masing desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa. Sedangkan di tingkat Kabupaten telah dibentuk semacam Asosiasi BPSPAMS yang beranggotakan BPSPAMS perdesaan se Kabupaten Magelang.

### **Pengaturan**

PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang , mempunyai wilayah cakupan pelayanan meliputi 15 Kecamatan dari total 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang. Untuk menjangkau dan melayani pelanggan yang termasuk dalam wilayah cakupan tersebut , PDAM Kabupaten Magelang memiliki 3 Unit Pelayanan dan 10 Sub. Unit Pelayanan.

Dalam rangka menyikapi SPAM sebagai suatu SBU ( Satuan Bisnis Unit ) untuk PDAM Kabupaten Magelang , SBU yang digunakan adalah Unit Pelayanan. Karena itu, sudut pandang baik dari aspek teknis, keuangan maupun manajemen / administrasi didasarkan menurut Unit , namun untuk hal tertentu seperti kondisi sumber air dan sistem pengolahan serta potensi pengembangan akan dilihat secara spesifik yaitu berdasarkan instalasi / sumber.

Pembentukan Unit / Sub Unit yang pada awalnya bertujuan untuk memberikan pelayanan pada konsumen yang bersifat administratif tapi juga mendapatkan otorisasi dalam mengambil keputusan dalam batas-batas kebijakan perusahaan , karena unit merupakan ujung tombak perusahaan dalam memasarkan produk.

Sedangkan untuk SPAM berbasis masyarakat, sebagai operator adalah BPSPAMS perdesaan yang mengatur baik aspek teknis maupun non teknis .

### **Pembiayaan**

Dengan asumsi distribusi air kepada pelanggan berjalan normal, maka tinggi rendahnya penerimaan PDAM dari penjualan air sangat dipengaruhi oleh dua hal yaitu :

- Besaran tarif yang diberlakukan kepada pelanggan.
- Besaran pemakaian air oleh pelanggan.

Tingkat tarif yang berlaku saat ini adalah tarif yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Magelang No. 15 / Kpts / 2003 yang mulai diberlakukan sejak bulan Juni 2006. Berdasar Keputusan ini tarif air mengalami penyesuaian setiap 6 bulan ( dua

kali dalam setahun ) hingga bulan Desember 2006. Besaran tarif dasar sejak bulan Juni 2006 hingga saat ini sekitar Rp. 690,-/ m3 ( untuk golongan rumah tangga terendah ).

Jika dilihat dari komponen biaya maka komponen biaya yang paling tinggi adalah sebagai berikut :

- Biaya administrasi dan umum sebesar 50 % dari total biaya operasional. Proporsi terbesar dari biaya administrasi dan umum ini berasal dari biaya pegawai ( 36 % ) dan rupa-rupa umum ( 27 % )
- Biaya distribusi sebesar 25 % dari total biaya operasional. Proporsi terbesar pada biaya distribusi adalah pada biaya pegawai ( 70 % )
- Biaya penyusutan 13 % dari total biaya operasional. Proporsi terbesar pada pos biaya penyusutan adalah pada jaringan distribusi dan transmisi

Dalam suatu proses produksi, ada dikenal biaya tetap dan biaya variabel. Yang termasuk dalam biaya tetap adalah biaya administrasi dan umum ( tidak termasuk biaya bunga pinjaman ), biaya pemeliharaan dan biaya penyusutan. Sedangkan yang termasuk biaya variabel antara lain biaya sumber air baku ( retribusi ), biaya bahan kimia, biaya bahan bakar untuk produksi, dan biaya listrik. Umumnya pada perusahaan yang berjalan baik , biaya tetap per m3 air terjual akan lebih kecil dari biaya variabelnya. Apabila terjadi biaya tetap per m3 air terjual lebih besar dari biaya variabelnya, maka yang perlu mendapat perhatian adalah kebijakan-kebijakan manajemen yang diterapkan.

Untuk SAM perdesaan yang dikelola oleh BPSPAMS maka besarnya iuran tidaklah sama untuk masing-masih desa. Besarnya iuran sangat bervariasi untuk masing-masih desa, namun pada umumnya masih relatif sangat kecil. Bahkan ada desa yang belum memungut iuran sama sekali. Besarnya iuran ditentukan berdasarkan kesepakatan dari masyarakat penerima manfaat. Hampir semua desa jumlah dana yang diperoleh dari iuran lebih kecil dari biaya operasional dan pemeliharaan. Belum ada yang memperhitungkan biaya pengembangan dan cost recovery.

**Tabel 16 Tarif Pelayanan Air Minum Kabupaten Magelang Tahun 2011**

No	Penyelenggara	Sistem (Perpipaan atau Non Perpipaan)	Tarif/m3	Kemampuan Tarif Memenuhi (berdasarkan kolom yang sesuai)		
				Operasional	Pemeliharaan	Recovery
1	PDAM	Perpipaan	Rp. 690,-			
2	BPSPAMS ...	Perpipaan	Rp. 500,-			

*Sumber: PDAM dan DMAC Kab. Magelang*

### 1.2.3 Hasil Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah yang Berimplikasi pada Kebutuhan

#### Pelayanan AMPL

Memperhatikan pada situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan memperhitungkan kontinuitas dan sinergitas pelaksanaan pembangunan, serta memperhatikan moto Kabupaten Magelang “**Gemah Ripah Iman Cemerlang**” atau “**Gemilang**” maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014 menetapkan bahwa visi dan misi Kabupaten Magelang adalah:

VISI : “TERWUJUDNYA KABUPATEN MAGELANG YANG LEBIH SEMANAH (SEJAHTERA, MAJU, DAN AMANAH)”

**Semanah** semakna dengan sehat, sehingga makna **Semanah** dimaksudkan adanya kebersamaan di Kabupaten Magelang antar dan inter Pimpinan Pemerintahan Daerah dan jajarannya beserta segenap komponen masyarakatnya untuk mewujudkan **Kabupaten Magelang yang Lebih Sejahtera, Maju dan Amanah.**

Oleh karena itu pernyataan visi di atas memiliki makna filosofis yang akan dijabarkan berikut ini untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

**Sejahtera.** Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Magelang, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil) secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa, kondisi masyarakat yang sejahtera ditunjukkan dengan masyarakat yang *wareg, wutuh, waras*, dan *wasis*; yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pangan (*wareg*), sandang dan papan (*wutuh*), terjamin kesehatan jasmani-rohani (*waras*), dan masyarakat yang cerdas (*wasis*).

Daerah dan masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama, dan (2) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.

**Maju.** Kemajuan suatu daerah atau masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi fisik dan non fisik yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Pembangunan diarahkan untuk membentuk daerah yang mandiri dengan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama yang sinergis dan kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang.

Daerah dan masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana daerah, dan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

**Amanah.** Pemerintahan yang amanah adalah pemerintahan yang senantiasa mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

**Misi** pembangunan Kabupaten Magelang selama 2009 sampai dengan 2014 adalah sebagai berikut:

**1. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama.**

Pelaksanaan dari misi pertama pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014 ini akan ditekankan pada sembilan urusan pemerintahan yaitu: (1) Kesehatan, (2) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, (3) Pendidikan, (4) Kepemudaan dan Olahraga, (5) Perpustakaan, (6) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (7) Sosial, (8) Kebudayaan, dan (9) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**2. Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing.**

Pelaksanaan dari misi kedua pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014 ini akan ditekankan pada sepuluh urusan pemerintahan yaitu: (1) Ketenagakerjaan, (2) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, (3) Penanaman Modal, (4) Ketahanan Pangan, (5) Pertanian, (6) Kelautan dan Perikanan, (7) Perdagangan, (8) Industri, (9) Ketransmigrasian, dan (10) Pariwisata.

**3. Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah.**

Pelaksanaan dari misi ketiga pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014 ini akan ditekankan pada empat urusan pemerintahan yaitu: (1) Pekerjaan Umum, (2) Perumahan, (3) Energi dan Sumber Daya Mineral, dan (4) Perhubungan.

**4. Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup.**

Pelaksanaan dari misi keempat pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014 ini akan ditekankan pada tiga urusan pemerintahan, yaitu: (1) Penataan Ruang, (2) Lingkungan Hidup, dan (3) Kehutanan.

## **5. Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.**

Pelaksanaan dari misi kelima pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014 ini akan ditekankan pada tujuh urusan pemerintahan, yaitu: (1) Perencanaan Pembangunan, (2) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, (3) Statistik, (4) Kearsipan, (5) Komunikasi dan Informatika, (6) Kependudukan dan Catatan Sipil, dan (7) Pertanahan.

## **6. Menciptakan Masyarakat yang Aman dan Tenteram.**

Pelaksanaan dari misi keenam pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014 ini akan ditekankan pada satu urusan pemerintahan, yaitu: Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut, kebijakan pembangunan yang dinilai akan berimplikasi pada pelayanan AMPL daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama ; dengan kebijakan ini maka peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi prioritas, termasuk didalamnya melalui peningkatan cakupan akses air minum dan sanitasi
- b. Kebijakan membangun perekonomian daerah berbasis potensi local yang berdaya saing; dengan kebijakan ini maka pemenuhan akses air minum dan sanitasi untuk mendukung produktifitas sumber daya manusia pedesaan juga menjadi prioritas.
- c. Kebijakan meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah; dengan kebijakan ini maka peningkatan cakupan layanan air bersih termasuk dalam kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan.
- d. Kebijakan memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup; dengan kebijakan ini maka peningkatan cakupan layanan air bersih termasuk dalam kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan.

### **1.2.4 Perkiraan Kebutuhan Investasi Pelayanan AMPL Daerah**

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target 7C MDGs. Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat

mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat.

Terdapat berbagai metoda perhitungan untuk memperkirakan kebutuhan investasi AMPL suatu daerah. Dalam hand-out ini, metoda perhitungan yang digunakan relative sederhana, yaitu dengan menggunakan biaya per satuan unit (unit cost) tambahan akses sampai dengan 2015 mendatang. Data-data yang diperlukan adalah:

- Data jumlah penduduk tahun dasar perhitungan
- Data jumlah penduduk perkotaan tahun dasar perhitungan (jika data tersedia)
- Data jumlah penduduk perdesaan tahun dasar perhitungan (jika data tersedia)
- Data proyeksi jumlah penduduk pada 2015
- Data proyeksi jumlah penduduk perkotaan pada 2015 (jika data tersedia)
- Data proyeksi jumlah penduduk perdesaan pada 2015 (jika data tersedia)
- Data proporsi rumah tangga (atau proporsi penduduk) yang telah mengakses air minum dan sanitasi (skala kab/kota dan dirinci perkotaan dan perdesaan (jika data akses di perkotaan dan di perdesaan tersedia)
- Biaya per satuan unit (unit cost) investasi air minum berbasis lembaga (dinas, badan, perusahaan daerah, swasta)
- Biaya per satuan unit (unit cost) investasi air minum berbasis masyarakat (contoh PAMSIMAS)

Tambahan akses sampai dengan 2015 dihitung berdasarkan target 7C MDGs kabupaten/kota, baik pada air minum dan sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya.

Investasi sanitasi dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Magelang sampai dengan tahun 2015 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang

matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL. Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Magelang tahun 2015 adalah sebagai berikut :

#### **1.2.4.1 Investasi Air Minum**

Investasi bagi peningkatan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi didasarkan pada hasil pemetaan atas besar cakupan pelayanan yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya.

Perkiraan investasi air minum di Kabupaten Magelang adalah sebagai tersebut pada Tabel 15a.

#### **1.2.4.2 Investasi Sanitasi**

Investasi bagi peningkatan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dihitung dengan menggunakan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Penerapan pendekatan perkiraan investasi sanitasi ini sama dengan perkiraan investasi air minum dengan pendekatan berbasis masyarakat.

.Berdasarkan pendekatan perkiraan investasi untuk air minum dan sanitasi pada Tabel 17 dan Tabel 18, **total investasi** yang diperlukan bagi pencapaian target 7C Kabupaten Magelang adalah **Rp. 37.250.588.632** selama 5 tahun (2011-2015). Atau **Rp 7.450.117.726** per tahun.

Jika dibandingkan dengan investasi **APBD** Kabupaten Magelang untuk AMPL dalam tiga tahun terakhir rata-rata adalah **1,51 milyar rupiah per tahun**, maka diperlukan terobosan dalam strategi investasi pencapaian target 7C MDGs ini. Kesenjangan investasi sekitar **5,94** milyar rupiah per tahun ini memerlukan kerjasama multipihak antara Pemerintah Daerah, Provinsi, Pusat, dunia usaha, lembaga donor, perbankan, dan masyarakat. Alokasi APBD Kabupaten Magelang untuk investasi air minum dan sanitasi ini perlu ditingkatkan dengan melakukan reorientasi fokus program tahunan dan realokasi anggaran program.

**Tabel 17 Perkiraan Kebutuhan Investasi Air Minum Kabupaten Magelang sd 2015**

No	Indikator	Saat Ini (2010)		2015		Tambah Akses sd 2015		Biaya Investasi per Unit (Rp)	Kebutuhan Investasi** sd 2015 (Rp)	
		Formula	Data	Formula	Hasil	Formula	Hasil		Formula	Hasil
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
1	Jumlah penduduk (jiwa)		1,181,723		1,216,642					
1.a	Perkotaan (jiwa)		179,777		186,883					
1.b	Perdesaan (jiwa)		1,001,946		1,029,759					
2	Jumlah penduduk dengan akses air minum layak (jiwa)		609,745	F3XF1	922,202	F2-D2	312,457		K2.a+ K2.b	<b>146,516,622,500</b>
2.a	Perkotaan (jiwa)*		158,763	F3.aXF1.a	175,961	F2.a-D2.a	17,198		H2.aX I2.a	target tambahan PDAM jiwaX I2.a
							4,000	3.000.000/KK (pendekatan kelembagaan)		12,000,000,000
							2,398	350.000/Jiwa (pendekatan berbasis masyarakat)		(H2a-target tambahan PDAM)X I2.a 839,192,364
2.b	Perdesaan (jiwa)*		450,982	F3.bXF1.b	746,630	F2.b-D2.b	295,648			
							17,713	3.000.000/KK (pendekatan kelembagaan)	H2.bX I2.b	53,139,000,000
							230,110	350.000/Jiwa (pendekatan berbasis masyarakat)		80,538,430,136
3	Cakupan penduduk dengan akses air minum layak (%)	(D2):(D1)	<b>51.60%</b>	(D3)+(0.5X(1-D3))	75.80%					
3.a	Cakupan di perkotaan (%)	(D2.a):(D1.a)	88.31%	(D3.a)+(0.5X(1-D3.a))	94.16%					
3.b	Cakupan di perdesaan (%)	(D2.b):(D1.b)	45.01%	(D3B)+(0.5X(1-D3.b))	72.51%					



**Tabel 18 Analisis4 Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi**

No	Indikator	Saat Ini (2010)		2015		Tambahannya sd 2015		Biaya Investasi per Unit (Rp)	Kebutuhan Investasi** sd 2015 (Rp)	
		Formula	Data	Formula	Hasil	Formula	Hasil		Formula	Hasil
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
1	Jumlah penduduk (jiwa)		1,181,723		1,216,642					
1.a	Perkotaan (jiwa)		179,777		186,883					
1.b	Perdesaan (jiwa)		1,001,946		1,029,759					
2	Jumlah penduduk dengan akses sanitasi layak (jiwa)		742,183	F3XF1	990,378	F2-D2	248,195		K2.a+ K2.b	<b>37,250,588,632</b>
2.a	Perkotaan (jiwa)*		137,092	F3.aXF1.a	164,697	F2.a-D2.a	27,605	150,000/jiwa	H2.aX I2.a	4,140,706,246
2.b	Perdesaan (jiwa)*		605,091	F3.bXF1.b	825,823	F2.b-D2.b	220,733	150,000/jiwa	H2.bX I2.b	33,109,882,386
3	Cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak (%)	(D2):(D1)	62.81%	(D3)+(0.5X(1-D3))	81.40%					
3.a	Cakupan di perkotaan (%)	(D2.a):(D1.a)	76.26%	(D3.a)+(0.5X(1-D3.a))	88.13%					
3.b	Cakupan di perdesaan (%)	(D2.b):(D1.b)	60.39%	(D3B)+(0.5X(1-D3.b))	80.20%					

### 1.3 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN.

#### Tantangan Nasional dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Tantangan utama dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak antara lain sebagai berikut:

**1) Belum lengkap dan terbaharukannya perangkat peraturan yang mendukung penyediaan air minum dan sanitasi yang layak.**

Sejumlah peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sebagai contoh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang belum direvisi, sehingga menyulitkan PDAM untuk melakukan korporasi. Di samping itu, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi perlu lebih diperjelas.

**2) Belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor dalam penyediaan air minum dan sanitasi yang layak.**

Banyak institusi dan lembaga yang membidangi pembangunan air minum dan sanitasi, sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif, terutama pada tataran pelaksanaan program.

**3) Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air minum.**

Masih banyaknya rumah tangga yang menggunakan sumber air minum non-perpipaan menurunkan kuantitas sumber daya air minum, ditambah lagi sistem sanitasi on-site yang ada juga belum disertai dengan investasi dalam infrastruktur penampungan, pengolahan, dan pembuangan limbah tinja sehingga meningkatkan pencemaran terhadap sumber air baku.

**4) Belum diimbangnya pertumbuhan penduduk, terutama di perkotaan dengan pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi yang layak.**

Tingkat investasi dalam penyediaan sambungan perpipaan khususnya di perkotaan tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk perkotaan. Begitu pula investasi dalam penyediaan layanan sambungan air limbah terpusat skala kota (**sewerage system**) dan skala komunal (**communal system**).

**5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).**

Keadaan dan perilaku tidak sehat tercermin dari masih tingginya kasus diare yang mencapai 411 per 1.000 penduduk (Survei Morbiditas Diare Kemkes, 2010). Mencuci

tangan dengan sabun masih jarang dilakukan; sekitar **47%** persen rumah tangga masih melakukan buang air besar di tempat terbuka; dan meskipun hampir semua rumah tangga merebus air untuk minum, namun **76,19 %**. dari air tersebut masih mengandung bakteri E. coli. Hal ini menunjukkan arti pentingnya kampanye serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk menumbuhkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat. Saat ini, upaya KIE telah dilakukan namun masih kurang memadai. Hal ini mencerminkan masih rendahnya prioritas yang diberikan oleh para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan KIE.

**6) Masih terbatasnya penyedia air minum yang layak baik oleh PDAM dan non-PDAM yang sehat (kredibel dan profesional), terutama di daerah perkotaan.**

Kinerja PDAM yang tidak baik dapat semakin diperburuk oleh anggapan masyarakat bahwa air adalah sesuatu yang dapat diperoleh secara cuma-cuma, bukan merupakan komoditas yang langka. Hal ini membuat masyarakat enggan membayar iuran air minum, yang pada akhirnya mempersulit penyedia layanan untuk meningkatkan layanannya melalui investasi baru. Penetapan dan pengaturan tarif belum memenuhi prinsip pemulihan biaya (full-cost recovery). Di samping itu, dalam penyediaan air minum berbasis masyarakat, kualitas sumber daya manusia pada lembaga pengelola juga masih menjadi kendala.

**7) Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah untuk menangani sektor air minum dan sanitasi, padahal penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi yang layak telah menjadi kewenangan pemerintah daerah.**

Dukungan perencanaan dan penganggaran untuk penyediaan air minum dan sanitasi yang layak belum menjadi prioritas, tercermin dari rendahnya alokasi anggaran daerah dalam mendukung pembangunan baru maupun perbaikan infrastruktur air minum dan sanitasi yang telah ada. Selain itu, masih minimnya kapasitas sumber daya manusia pelaksana pembangunan air minum dan sanitasi di daerah juga menjadi kendala penyediaan air minum dan sanitasi.

**8) Investasi sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang layak masih kurang memadai, baik dari pemerintah maupun swasta.**

Hal tersebut antara lain diakibatkan oleh pendanaan yang masih bertumpu pada anggaran Pemerintah Pusat. Rendahnya kinerja keuangan PDAM juga menyebabkan PDAM sulit mendapatkan sumber pendanaan alternatif. Sementara itu, sumber pendanaan dari pihak swasta, baik dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) ataupun **Corporate Social Responsibility (CSR)** masih belum dimanfaatkan secara signifikan.

## **Permasalahan dan Tantangan Kabupaten Magelang dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi**

Permasalahan dan tantangan Kabupaten Magelang dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

### **1) Teknis:**

#### **Permasalahan yang dihadapi adalah:**

- a) Kualitas jaringan sarana air bersih (SAB) belum memenuhi syarat teknis
- b) Kurangnya ketersediaan sumber mata air
- c) Masih adanya kebocoran air di jaringan eksisting PDAM
- d) Di luar jaringan perpipaan, saat ini opsi yang tersedia adalah sumur bor (sumur dalam), sehingga ada kemungkinan kegagalan dalam pengeboran;

#### **Tantangan yang dihadapi adalah**

- a) Perkembangan teknologi penyediaan air bersih yang semakin maju
- b) Ancaman bencana lahar dingin gunung Merapi terhadap jaringan perpipaan PDAM
- c) Belum tersedianya cadangan air baku yang sustainable dan dapat diandalkan
- d) Beberapa desa tidak terdapat sumber mata air

### **2) Sosial:**

#### **Permasalahan yang dihadapi adalah:**

- a) Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, terutama bagi masyarakat perdesaan
- b) Rendahnya daya beli masyarakat terhadap penyediaan sarana air minum dan penyehatan lingkungan
- c) Konflik pemanfaatan air untuk air minum dan irigasi pertanian
- d) Anggapan masyarakat di perdesaan bahwa air belum dinilai sebagai barang ekonomi, sehingga menyulitkan pengembangan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.

#### **Tantangan yang dihadapi adalah:**

- a) Pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga semakin banyak yang memerlukan akses air minum dan sanitasi layak sampai dengan 2015
- b) Perubahan budaya masyarakat

### **3) Kelembagaan:**

#### **Permasalahan yang dihadapi adalah:**

- a) Kurang optimalnya pengelolaan sarana prasarana AMPL
- b) Terbatasnya kemampuan kelembagaan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi di perdesaan
- c) Terbatasnya jumlah sumber daya manusia untuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) PHBS.

d) Kurangnya monitoring pengelolaan sarana prasarana AMPL

**Tantangan yang dihadapi adalah:**

- a) Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang air minum dan penyehatan lingkungan
- b) Belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan Kabupaten Magelang sampai dengan 2015
- c) Penanganan masalah air minum dan penyehatan lingkungan belum menjadi program prioritas dalam RPJMD

**4) Pendanaan:**

**Permasalahan yang dihadapi adalah:**

- a) Keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan AMPL
- b) Tingginya biaya operasional pemeliharaan pasca konstruksi
- c) Terbatasnya anggaran untuk perluasan jaringan PDAM

**Tantangan yang dihadapi adalah:**

- a) Kebutuhan anggaran pembangunan daerah semakin meningkat
- b) Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi
- c) Belum optimalnya dukungan terhadap program AMPL dalam kebijakan anggaran.

**5) Lingkungan:**

**Permasalahan yang dihadapi adalah:**

- a) Kerusakan lingkungan di daerah tangkapan dan resapan air akibat alih fungsi lahan
- b) Keterbatasan sumber air di beberapa desa
- c) Pencemaran terhadap sumber air

**Tantangan yang dihadapi adalah:**

- a) Berkurangnya sumber daya air akibat bencana erupsi dan lahar dingin gunung Merapi
- b) Berkurangnya jumlah dan debit mata air
- c) Bertambahnya pencemaran limbah rumah tangga dan industri
- d) Tingginya kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin keberlangsungan tersedianya air baku yang dapat diandalkan
- e) Kecenderungan pola tanam masyarakat yang tidak mendukung kelestarian sumber mata air

### 1.3.1 Isu Strategis Kabupaten Magelang dalam Pencapaian Target AMPL 2015

Berdasarkan permasalahan dan tantangan ditinjau dari kelima aspek tersebut di atas, **isu strategis** penyediaan air minum dan sanitasi Kabupaten Magelang yang akan ditangani sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi yang layak
- 2) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
- 3) Kurangnya upaya pengelolaan lingkungan (konservasi dan perlindungan sumberdaya air)
- 4) Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di masyarakat
- 5) Terbatasnya kemampuan pendanaan pemerintah daerah
- 6) Keterbatasan sumber daya manusia yang menangani teknologi masalah air minum dan penyehatan lingkungan
- 7) Terbatasnya ketersediaan air yang *sustainable* dan dapat diandalkan;
- 8) Belum optimalnya dukungan kebijakan anggaran bagi perluasan cakupan akses air minum dan sanitasi
- 9) Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi.

### 1.3.2 Isu Strategis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Magelang

Tabel 19 Proyeksi Jumlah Penduduk dengan Akses Air Minum Layak

Tahun	2010	2015
Cakupan Penduduk dengan akses air minum layak (%)	51,60 %	75,80 %
Cakupan Penduduk Perkotaan dengan akses air minum layak (%)	88,31 %	94,16 %
Cakupan Penduduk Perdesaan dengan akses air minum layak (%)	45,01 %	72,51 %
Jumlah Penduduk dengan akses air minum layak (jiwa)	609.745	922.202
Jumlah Penduduk Perkotaan dengan akses air minum layak (jiwa)	158.763	175.961
Jumlah Penduduk Perdesaan dengan akses air minum layak (jiwa)	450.982	746.630
Tambahan penduduk dengan akses air minum layak (jiwa)		312.457
Tambahan penduduk perkotaan dengan akses air minum layak (jiwa)		17.198
Tambahan penduduk perdesaan dengan akses air minum layak (jiwa)		395.648

**Tabel 20 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Magelang sampai dengan Tahun 2015**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
A	Kependudukan						
1	Jumlah penduduk	Jiwa	1.188.707	1.195.691	1.202.675	1.209.659	1.216.642
2	Tingkat pelayanan	%	56,44 %	61,28 %	66,12 %	70,96 %	75,80 %
3	Penduduk terlayani	Jiwa	672.236	734.727	797.218	859.709	922.202
4	Jumlah penduduk per SR	Jiwa	5	5	5	5	5
B	Kebutuhan Domestik						
1	Jumlah SR	Unit	42.035	46.430	52.188	57.188	62.188
2	Pemakaian per orang	Lt/hari	120	120	120	120	120
3	Kebutuhan air SR	Lt/det	291,91	322,43	362,42	397,14	431,86
4	Kebutuhan Domestik	Lt/det	291,91	322,43	362,42	397,14	431,86
C	Kebutuhan Non Domestik						
	15% dari Kebutuhan Domestik	Lt/det	43,79	48,36	54,36	59,57	64,78
	Total kebutuhan non domestik	Lt/det	43,79	48,36	54,36	59,57	64,78
D	Kebutuhan air total	Lt/det	335,7	370,79	416,78	456,71	496,64
E	Kehilangan air						
	% Kehilangan air	%	≤20%	≤20%	≤20%	≤20%	≤20%
	Jumlah kehilangan air	Lt/det	67,14	74,16	83,36	91,34	99,33
F	Kebutuhan air rata-rata (D+E)	Lt/det	402,84	444,95	500,14	548,05	595,97
G	Kebutuhan hari maksimum						
	Faktor koefisien		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	Kebutuhan air	Lt/det	<u>483,41</u>	<u>533,94</u>	<u>600,17</u>	<u>657,66</u>	<u>715,16</u>
H	Kebutuhan jam puncak						
	Faktor koefisien		1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
	Kebutuhan air	Lt/det	<u>704,97</u>	<u>778,66</u>	<u>875,245</u>	<u>959,09</u>	<u>1.042,95</u>

## **BAB 2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET 7C MDGS**

---

### **2.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN AMPL 2015**

Secara sederhana pernyataan tujuan menunjukkan arah tindakan perubahan sedangkan pernyataan sasaran menunjukkan besar hasil perubahan.

Peningkatan kapasitas pelayanan bidang air minum dan sanitasi sampai dengan 2015 di Kabupaten Magelang bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
- 3) Mempertahankan ketersediaan air secara berkelanjutan dan menjamin pasokan air yang *sustainable* dan dapat diandalkan;
- 4) Meningkatkan jumlah BP SPAM aktif
- 5) Meningkatkan cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan PHBS
- 6) Meningkatkan kinerja teknis dan pengelolaan PDAM;

Adapun sasaran yang ditargetkan tercapai sampai dengan akhir 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan dari 51,60% menjadi 75,80%
- 2) Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan sanitasi yang layak dari 62,81% menjadi 81,40%
- 3) Memelihara dan mempertahankan kelestarian sumber mata air
- 4) Meningkatnya jumlah pengelola sarana prasarana AMPL yang aktif
- 5) Meningkatnya cakupan penduduk yang menerapkan PHBS, dari 71% menjadi 85%;
- 6) Terpenuhinya tambahan akses air minum oleh PDAM sebesar 4.000 KK;

Pentahapan pencapaian sasaran pembangunan air minum dan sanitasi Kabupaten Magelang ditampilkan tabel berikut ini:



**Tabel 21 Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah Kabupaten Magelang Tahun 2011 - 2015**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum yang layak	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum yang layak dari 51,60% menjadi 75,80%	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak	56,44% (672.236 jiwa)	61,28% (734.727 jiwa)	66,12% (797.218 jiwa)	70,96% (859.709 jiwa)	75,80% (922.202 jiwa)
2	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan sanitasi yang layak	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan sanitasi yang layak dari 60,81% menjadi 81,40%	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak dari 60,81% menjadi 81,40%	60,20% (711.513 jiwa)	65,50% (791.579 jiwa)	70,58% (871.645 jiwa)	75,44% (951.711 jiwa)	80,40% (1.031.781 jiwa)
3	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap PHBS	Menggalakkan kampanye PHBS melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa	Cakupan rumah tangga yang menerapkan PHBS (%)	71 %	74,5 %	78 %	81,5 %	85 %
4	Mempertahankan ketersediaan air secara berkelanjutan	Memelihara dan mempertahankan ketersediaan mata air	Jumlah mata air	0	45	45	48	48
5	Meningkatkan jumlah pengelola sarana prasarana AMPL	Meningkatnya pengelola sarana prasarana AMPL aktif	Pengelola sarana prasarana AMPL aktif	0	26	27	27	27

Penetapan pentahapan pencapaian sasaran di atas digunakan sebagai acuan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi. Program dan kegiatan AMPL 2011-2015, baik yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya harus berorientasi pada upaya pencapaian sasaran 2011-2015 tersebut.

## **2.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN TARGET AMPL 2015**

Berdasarkan tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan AMPL Kabupaten Magelang 2011-2015, arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan PDAM pada kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan PDAM (kawasan potensial PDAM)
- 2) Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan di kawasan perdesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM
- 3) Menggalakkan program STBM bagi desa/kawasan dengan tingkat cakupan akses sanitasi rendah/di bawah rata-rata kabupaten/kota
- 4) Menggalakkan kampanye PHBS melalui promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa
- 5) Meningkatkan konservasi, pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas ketersediaan air baku
- 6) Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi
- 7) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan air minum dan sanitasi
- 8) Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi pada kawasan-kawasan komersil

# BAB 3. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RAD AMPL 2011-2015

---

## 3.1 PROGRAM PENGEMBANGAN SPAM

Program prioritas pengembangan SPAM terdiri dari:

- 1) Program pengembangan unit air baku meliputi:
  - a. Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam  
Kegiatan:
    - a.1 Fasilitasi koordinasi perencanaan pemanfaatan dana untuk konservasi Sumber Daya Alam
    - a.2 Puncak penghijauan dan konservasi alam nasional
    - a.3 Penyelamatan dan pengendalian kawasan mata air
    - a.4 Pengendalian kerusakan lingkungan dengan pembuatan sumur resapan/biopori (DAK)
    - a.5 Penanggulangan daerah rawan bencana dengan pembuatan senderan di prasarana air bersih di sekitar mata air
    - a.6 Penghijauan di lingkungan objek vital untuk konservasi Sumber Daya Air
  - b. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya  
Kegiatan:
    - b.1 Inventarisasi dan penelolaan data dan informasi cadangan air tanah dan studi geohidrologi
    - b.2 Konservasi sumberdaya air tanah
  - c. Pelestarian sumber  
Kegiatan:
    - C.1 Penyelamatan dan pelestarian sumber mata air
    - C.2 Pembangunan / rehabilitasi bangunan penangkap air / broncaptering
    - C.3 Pembebasan lahan lokasi instalasi
- 2) Program pengembangan unit produksi meliputi:
  - a. Peningkatan pelayanan  
Kegiatan:
    - a.1 Penambahan kapasitas produksi
    - a.2 Penambahan kapasitas produksi (pendampingan)
    - a.3 Pembangunan reservoir

- a.4 Pengadaan dan pemasangan pompa distribusi
- a.5 Pembangunan bangunan operasional instalasi
- a.6 Pengadaan dan pemasangan meter induk
- 3) Program pengembangan unit distribusi meliputi:
  - a. Peningkatan pelayanan
    - Kegiatan:
      - a.1 Penambahan Sambungan Rumah (SR)
      - a.2 Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi
      - a.3 Rehabilitasi jaringan pipa distribusi
      - a.4 Pengadaan dan pemasangan meter induk / meter zoning
- 4) Program pengembangan unit pelayanan meliputi:
  - a. Pengembangan lingkungan sehat
    - Kegiatan:
      - a.1 PAMSIMAS
      - a.2 Pamsimas replikasi, DDUB dan BOP
      - a.3 Penggantian meter pelanggan

### **3.2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS SISTEM AIR MINUM**

Program prioritas pengembangan kapasitas sistem air minum terdiri dari:

- 1) Program pengembangan kapasitas pelayanan perkotaan meliputi:
  - a. Peningkatan pelayanan
    - Kegiatan:
      - a.1 Penambahan Sambungan Rumah (SR)
- 2) Program pengembangan kapasitas pelayanan perdesaan meliputi:
  - a. Pengembangan lingkungan sehat
    - Kegiatan:
      - a.1 PAMSIMAS
      - a.2 Pamsimas replikasi, DDUB dan BOP
  - b. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
    - Kegiatan:
      - b.1 Pembangunan SPAM DAK
      - b.2 SPAM
      - b.3 SPAM di daerah berpenduduk miskin dan akses air minum sangat kurang

### **3.3 PROGRAM PENURUNAN KEBOCORAN AIR MINUM**

Program prioritas penurunan kebocoran air minum terdiri dari:

a. Peningkatan pelayanan

Kegiatan:

- a.1 Pengurangan kebocoran/kehilangan air
- a.2 Mengganti pipa yang rusak, pecah, bocor dan tidak layak pakai.
- a.3 Meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi sambungan liar (illegal connection )
- a.4 Mengganti meter air yang rusak, kurang baik atau tingkat keakuratannya rendah.

### **3.4 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN PHBS**

Program prioritas peningkatan penerapan PHBS meliputi:

a. Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Kegiatan:

- a.1 Kursus penjamah makanan minuman

b. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Kegiatan:

- b.1 Survey Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- b.2 Advokasi dan sosialisasi instansi pelayanan kesehatan
- b.3 Pengembangan media kesehatan
- b.4 Penyuluhan kesehatan
- b.5 Pertemuan koordinasi program promosi kesehatan
- b.6 Evaluasi pelaksanaan desa siaga
- b.7 Pembinaan kader posyandu
- b.8 Pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat

### **3.5 PROGRAM PENYEDIAAN KEBUTUHAN SANITASI**

Program prioritas penyediaan kebutuhan sanitasi meliputi:

a. Lingkungan sehat perumahan

Kegiatan:

- a.1 Fasilitasi dan koordinasi peningkatan kinerja AMPL
- a.2 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
- a.3 Operasional pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Permukiman
- b. Pengembangan lingkungan sehat

Kegiatan:

- b.1 Pembangunan jamban keluarga
- b.2 Pengawasan dan pembinaan sanitasi tempat-tempat umum
- c. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Kegiatan:

- c.1 Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI)
- d. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Kegiatan:

- d.1 Penyediaan sarana dan prasarana pengolah limbah cair dan pembuatan biogas
- d.2 Penyediaan sarana dan prasarana pengolah limbah padat dan alat pencacah kompos

- e. Program pembangunan infrastruktur pedesaan

Kegiatan:

- e.1 PPIP
- e.2 Neighborhood Development (ND)/ PLP-BK
- e.3 PNPM perkotaan
- e.4 PNPM Mandiri Pedesaan

- f. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Kegiatan:

- f.1 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
- f.2 Pembuatan Tempat Penampungan Sampah Sementara
- f.3 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana sampah
- f.4 Rehap TPA
- f.5 Pembangunan kantor kemandoran
- f.6 Penyediaan sarana angkutan sampah
- f.7 Pengadaan bak/kotak sampah
- f.8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- f.9 Pengadaan tanah TPA

### **3.6 PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

Program prioritas pengelolaan lingkungan meliputi:

- a. Pembangunan infrastruktur perkotaan  
Kegiatan:
  - a.1 Penataan lingkungan di daerah kumuh perkotaan
- b. Pembangunan infrastruktur perkotaan  
Kegiatan:
  - b.1 Bantuan keuangan dari Gubernur untuk penataan lingkungan
- c. Pengembangan lingkungan sehat  
Kegiatan:
  - c.1 Penyehatan lingkungan dan pengendalian vector lalat di TPA/TPS
- d. Upaya kesehatan masyarakat  
Kegiatan:
  - d.1 Pencegahan penularan penyakit endemik DBD
- e. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan  
Kegiatan:
  - e.1 Pemeliharaan kebersihan kota Muntilan

### **3.7 PROGRAM PENGEMBANGAN BPSPAMS**

Program prioritas pengembangan BPSPAMS meliputi:

- a. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan :  
Kegiatan:
  - a.1 Penguatan kelembagaan PAMSIMAS
  - a.2 Memfasilitasi terbentuknya asosiasi BPSPAMS
  - a.3 Meningkatkan BPSPAMS menjadi mandiri dan berkembang

Tabel 22 Matriks Program Prioritas RAD AMPL Kabupaten Magelang 2011-2015

Kode						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir	SKPD Penanggung Jawab				
									2011		2012		2013				2014		2015	
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)	K	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	02	1	02	01	19	Program promosi kesehatan & pemberdayaan masyarakat														
						Advokasi & sosialisasi instansi pelayanan kesehatan	Terlaksananya advokasi & sosialisasi revitalisasi instansi kesehatan	29 puskesmas	29 puskesmas	100.000	29 puskesmas	110.000	29 puskesmas	115.000	29 puskesmas	120.000	DINKES			
						Pengembangan media kesehatan	Tersediannya sarana pengembangan promosi kesehatan	29 puskesmas	29 puskesmas	100.000	29 puskesmas	135.000	29 puskesmas	100.000	29 puskesmas	100.000	DINKES			
						Penyuluhan kesehatan	Terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan	29 puskesmas	29 puskesmas	75.000	29 puskesmas	125.000	29 puskesmas	125.000	29 puskesmas	125.000	DINKES			
						Pertemuan koordinasi program kesehatan	Terlaksananya kegiatan koordinasi program promkes	29 puskesmas	29 puskesmas	30.000	29 puskesmas	45.000	29 puskesmas	45.000	29 puskesmas	45.000	DINKES			
						Evaluasi pelaksanaan desa siaga	Akselerasi	372 desa/kel	372 desa/kel	50.000	372 desa/kel	50.000	372 desa/kel	50.000	372 desa/kel	50.000	DINKES			
						Pembinaan kader posyandu	Revitalisasi posyandu	2291 posyandu	2291 posyandu	15.000	2291 posyandu	15.000	2291 posyandu	15.000	2291 posyandu	15.000	DINKES			
						Pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	Peningkatan peran serta masy.	2291 UKBM	2291 UKBM	100.000	2291 UKBM	100.000	2291 UKBM	50.000	2291 UKBM	100.000	DINKES			
1	02	1	02	0	2	Program pengembangan														



Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	SKPD Penanggung Jawab						
				2011		2012		2013		2014		2015									
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
				1	1		lingkungan sehat														
							Pembangunan sarana jamban keluarga	Terbangunnya sarana jamban keluarga	808.792 jamban	400 jamban	200.000	400 jamban	200.000	400 jamban	200.000	400 jamban	200.000	810.792 jamban	DINKES		
						b	PAMSIMAS	Meningkatnya kesehatan, perilaku higienis dan pelayanan sanitasi	60,20 %	60,50 %	50.000	70,58 %	50.000	75,44 %	75.000	80,10%	75.000	85,00 %	80.000	85 %	DINKES
						b	PAMSIMAS (pendampingan)	Meningkatnya kesehatan, perilaku higienis dan pelayanan sanitasi	60,20 %	60,50 %	30.000	70,58 %	30.000	75,44 %	30.000	80,10%	30.000	85,00 %	30.000	85 %	DINKES
							Pengawasan & pembinaan sanitasi tempat-tempat umum	Sanitasi di tempat umum		1 lokasi	6000	1 lokasi	8000	1 lokasi	10.000	1 lokasi	10.000	1 lokasi	10.000		DINKES
							Penyehatan lingkungan dan pengendalian vector lalat di TPA/S	Pengendalian vector lalat di TPA/S	2 TPA dan 5 TPS	2 TPA dan 5 TPS	45.000	2 TPA dan 5 TPS	50.000	2 TPA dan 5 TPS	55.000	2 TPA dan 5 TPS	60.000	2 TPA dan 5 TPS	60.000	2 TPA dan 5 TPS	DINKES
1	03	1	03	0	2		Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, & sumber daya air lainnya														

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Inventarisasi & pengelolaan data & informasi CAT, pemanfaatan air tanah & SG	Tersusunnya data & informasi geohidrologi daerah sekitar mata air daerah imbuhan	2 lokasi (Sub DAS Kanci dan Sub DAS Tangsi)	2 lokasi (Sub DAS Kanci dan Sub DAS Tangsi)	152.000	2 lokasi (Sub DAS Kanci dan Sub DAS Tangsi)	75.000	2 lokasi (Sub DAS Kanci dan Sub DAS Tangsi)	100.000	2 lokasi (Sub DAS Kanci dan Sub DAS Tangsi)	100.000	2 lokasi (Sub DAS Kanci dan Sub DAS Tangsi)	100.000	2 lokasi (Sub DAS Kanci dan Sub DAS Tangsi)	DPU
	Konservasi sumberdaya air tanah	Pembuatan sumur, embung resapan air tanah	1 paket (5 sumur resapan)	1 paket (5 sumur resapan)	106.327	2 paket (10 sumur resapan)	100.000	4 paket (20 sumur resapan)	200.000	3 paket (15 sumur resapan)	150.000	3 paket (15 sumur resapan)	150.000	70 sumur resapan	DPU
1	03	1	03	0	2	1	7	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum & air limbah							
	Pembangunan SPAM (DAK)	Terbangunnya SPAM	-	8 paket	1.322.591	9 paket	3.600.000	9 paket	3.500.000	10 paket	3.500.000	-	-	-	DPU
	SPAM	Terbangunnya Jaringan Air Minum	-	17 desa	2.954.273	17 desa	2.954.273	17 desa	2.954.273	17 desa	2.954.273	-	-	68 desa	DPU
	Pamsimas	Penyediaan AM dan sanitasi di daerah miskin dan rawan air	36 desa	15 desa	2.887.500	14 desa	2.695.000	15 desa	2.887.500	15 desa	2.887.500	15 desa	2.887.500	110 desa	DPU
	Pamsimas Replikasi, DDUB dan BOP	Penyediaan AM dan sanitasi di	2 desa	2 desa	1.065.000	1 desa	790.000	2 desa	1.065.000	2 desa	1.065.000	1 desa	790.000	10 desa	DPU

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	SKPD Penanggung Jawab	
				2011		2012		2013		2014		2015				
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		daerah miskin dan rawan air														
	SPAM di daerah berpenduduk miskin & akses air minum sangat kurang	Terbangunnya SPAM	-	1 lokasi	225.000	2 lokasi	625.000	2 lokasi	675.000	2 lokasi	750.000	2 lokasi	825.000	9 desa	DPU	
	Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)/DAK	Terbangunnya MCK+ dan IPAL Komunal	4 lokasi	6 lokasi	3.477.100	4 lokasi	2.318.066	4 lokasi	2.318.066	4 lokasi	2.318.066	4 lokasi	2.318.066	22 lokasi	DPU	
	Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI)	Terbangunnya sanitasi di perkotaan	-	-	-	-	-	6 lokasi	2.100.000	6 lokasi	2.100.000	6 lokasi	2.100.000	18 lokasi	DPU	
	Updating dan evaluasi penyusunan data potensi air baku & daerah pelayanan	Tersusunnya buku data potensi air baku dan daerah pelayanan	1 paket	1 paket	75.000	1 paket	75.000	1 paket	75.000	1 paket	75.000	1 paket	75.000	1 paket	DPU	
1	03	1	03	0	3	1	0									
	Program pembangunan infrastruktur pedesaan															
	PPIP	Jumlah desa/kelurahan	24 desa	35 desa	5.900.000	25 desa	4.350.000	15 desa	3.750.000	15 desa	3.750.000	15 desa	3.750.000	110 desa	DPU	
	PPIP (pendamping)	Jumlah desa/kelurahan	24 desa	35 desa	112.500	25 desa	125.000	15 desa	125.000	15 desa	125.000	15 desa	125.000	110 desa	DPU	
	ND/PLP-BK	Jumlah lokasi	4 desa	-	-	5 desa	5.000.000	6 desa	6.000.000	6 desa	6.000.000	6 desa	6.000.000	27 desa	DPU	
	ND/PLP-BK (pendamping)	Jumlah lokasi	4 desa	4 desa	80.000	5 desa	182.000	6 desa	200.000	6 desa	220.000	6 desa	220.000	27 desa	DPU	
	PNPM Perkotaan (P2KP)	Jumlah lokasi	27 desa	27 desa	4.245.000	27 desa	3.230.000	27 desa	4.245.000	27 desa	3.230.000	27 desa	4.245.000	27 desa	DPU	
	PNPM Perkotaan (pendamping/DDUB+BO P)	Jumlah paket pendampingan	1 paket	1 paket	80.000	1 paket	100.000	1 paket	100.000	1 paket	100.000	1 paket	100.000	1 paket	DPU	
	Bantuan keuangan dari gubernur untuk penataan lingkungan	Jumlah lokasi	10 lokasi	4 lokasi	1.000.000	4 lokasi	1.000.000	4 lokasi	1.000.000	4 lokasi	1.000.000	-	-	26 lokasi	DPU	
	Bantuan keuangan dari gubernur untuk penataan lingkungan	Jumlah lokasi	10 lokasi	4 lokasi	75.000	4 lokasi	75.000	4 lokasi	100.000	4 lokasi	100.000	-	-	26 lokasi	DPU	

Kode						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir	SKPD Penanggung Jawab			
									2011		2012		2013		2014				2015		
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
						(pendamping)															
1	03	1	03	0 1	3 1		Pembangunan infrastruktur perkotaan														
							Penataan lingkungan di daerah kumuh perkotaan	Lokasi	-	2 lokasi	400.000	2 lokasi	400.000	2 lokasi	400.000	2 lokasi	400.000	-	-	8 lokasi	DPU
							Pembangunan jalan poros & akses masuk ke kawasan perumahan/pemukiman	Lokasi	-	1 lokasi	1.575.000	1 lokasi	1.575.000	1 lokasi	1.575.000	1 lokasi	1.575.000	-	-	4 lokasi	DPU
1	03	1	03	0 1	1 6		Program lingkungan sehat perumahan														
1	04	1	06	0 1	1 6	09	Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kinerja AMPL	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi di bidang AMPL	1 paket	1 paket	59.000	1 paket	160.000	1 paket	50.000	1 paket	50.000	1 paket	50.000	1 paket	Bappeda
							Pembangunan jalan poros & akses masuk ke kawasan perumahan/pemukiman (pendamping APBN)	Lokasi	-	-	-	1 lokasi	175.000	1 lokasi	175.000	1 lokasi	175.000	-	-	3 lokasi	DPU
1	08	1	03	0 1	1 5		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan														
							Penyediaan sarana & prasarana pengelolaan persampahan	Terwujudnya Kebersihan Jalan dan Lingkungan	7 kec	7 kec	457,103	7 kec	281,068	7 kec	678,936	7 kec	425,000	7 kec	500,000	7 kec	DPU & ESDM
							Pembuatan Tempat Pembuangan sampah sementara (TPS)	Tersedianya Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang memadai	-	4 TPS	99,542	-	-	-	-	6 TPS	200,000	-	-	6 TPS	DPU & ESDM

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Prasarana Sampah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Angkutan Sampah	8 truk, 5 kend. roda tiga, 2 excavator, 1 loader	8 truk, 5 kend. roda tiga, 2 excavator, 1 loader	834,565	8 truk, 5 kend. roda tiga, 2 excavator, 1 loader	786,547	8 truk, 5 kend. roda tiga, 2 excavator, 1 loader	1,000,000	10 truk, 5 kend. roda tiga, 2 excavator, 1 loader	1,100,000	13 truk, 5 kend. roda tiga, 2 excavator, 1 loader	1,250,000	13 truk, 5 kend. roda tiga, 2 excavator, 1 loader	DPU & ESDM
	Pemeliharaan Kebersihan Mutilan Kota	Terpeliharanya Kebersihan Kota Mutilan	1 Kec	1 Kec	250,044	1 Kec	246,233	1 Kec	469,655	1 Kec	550,000	1 Kec	650,000	1 Kec	DPU & ESDM
	Rehab TPA	Tersedianya Tempat TPA yang memadai	2 TPA	-	-	-	-	-	-	1 TPA	150,000	-	-	2 TPA	DPU & ESDM
	Pembangunan Kantor Kemandoran	Tersedianya Kantor Kemandoran yang memadai	3 kantor	-	-	-	-	1 kantor	150,000	1 kantor	150,000	-	-	5 kantor	DPU & ESDM
	Pengadaan Sarana Angkutan Sampah	Tersedianya Sarana Angkutan Sampah yang memadai	8 unit truk, 5 kend. Roda tiga, 2 excavator, 1 loader, 10 container	-	-	2 container	50,000	-	-	2 truk	1,000,000	3 truk	1,500,000	13 truk, 5 kend. roda tiga, 2 excavator, 1 loader, 2 container	DPU & ESDM
	Pengadaan Bak/kotak Sampah	Tersedianya Bak/kotak	-	-	-	-	-	80 bak/kot	100,000	80 bak/kota	100,000	100 bak/ko	125,000	260 bak/ko	DPU & ESDM

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	SKPD Penanggung Jawab	
				2011		2012		2013		2014		2015				
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Sampah yang memadai						ak sampah		k sampah		tak sampah		tak sampah		
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya data volume sampah	-	-	-	-	-	1 bk	25,000	1 bk	25,000	1 bk	25,000	1 buku	DPU & ESDM	
	Pengadaan Tanah	Tersedianya lahan TPA yang memadai	-	-	-	-	-	1 lokasi	5,000,000	-	-	-	-	1 lokasi	DPU & ESDM	
1	22	1	xx	x	1											
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa															
1	22	1	03	0	1											
	Pengadaan aspal & semen untuk desa	Lokasi	21 kec	21 kec	5.000.000	21 kec	5.000.000	21 kec	5.000.000	21 kec	5.000.000	21 kec	5.000.000	21 kec	DPU	
1	11	1	22	0	1											
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak															
	Pemberdayaan masyarakat berperspektif gender	Peningkatan peran perempuan	10 kec	2 kec	35.000	2 kec	35.000	2 kec	40.000	2 kec	79.000	2 kec	79.000	20 kec	BPMP KB	
1	11	1	22	0	1											
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan															
	Pemberdayaan peran institusi masyarakat pedesaan	Terselenggaranya evaluasi dan advokasi ketahanan keluarga	21 kec	21 kec	40.000	21 kec	40.000	21 kec	60.000	21 kec	60.000	21 kec	60.000	21 kec	BPMP KB	

Kode						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir	SKPD Penanggung Jawab					
									2011		2012		2013				2014		2015		
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)	K	Rp (000)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	22	1	22	01	15	Program peningkatan keberdayaan masy. pedesaan															
						Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya KPM yang profesional	50 ds	50 ds	20.000	50 ds	20.000	50 ds	25.000	50 ds	25.000	50 ds	30.000	300 ds		BPMP KB
						Fasilitasi penguatan kelembagaan desa	Pelatihan anggota kelembagaan ds	2 ds	2 ds	25.000	2 ds	25.000	2 ds	25.000	2 ds	25.000	2 ds	25.000	12 ds		BPMP KB
						Penguatan kelembagaan PAMSIMAS	Terbentuknya lembaga PAMSIMAS	-	-	-	14 ds	30.000	14 ds	35.000	14 ds	35.000	14 ds	40.000	56 ds		BPMP KB
						Program penanggulangan kemiskinan															
						PNPM MP	Peningkatan kemandirian dan partisipasi masy. dalam pembangunan	19 kec	19 kec	60.725.000	19 kec	61.000.000	19 kec	61.000.000	19 kec	61.000.000	19 kec	61.000.000	19 kec		BPMP KB
						PNPM (Pendamping) MP	Peningkatan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	19 kec	19 kec	4.400.000	19 kec	1.425.000	19 kec	457.000	19 kec	450.000	19 kec	550.000	19 kec		BPMP KB
						PNPM MP (Biaya Operasional)	Peningkatan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	19 kec	19 kec	430.000	19 kec	450.000	19 kec	700.000	19 kec	750.000	19 kec	750.000	19 kec		BPMP KB
						Fasilitasi pelaksanaan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (Biaya Operasional)	Peningkatan kualitas perumahan masyarakat	108 unit	24 unit	84.005	386 unit	332.812	200 unit	35.000	250 unit	40.000	250 unit	40.000	1.218 unit		BPMP KB

Kode							Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	SKPD Penanggung Jawab				
										2011		2012		2013		2014		2015							
										K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)						
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	08	1	xx	x x	1 7		Program Perlindungan dan Konservasi SDA																		
1	08	1	08	0 1	1 7	18	Puncak Penghijauan dan konservasi alam nasional	Jml Kelompok penenerima penghargaan bagi penyelamat lingkungan	4 kelompok	4 kelompok	20.000	4 kelompok	20.000	4 kelompok	40.000	4 kelompok	50.000	4 kelompok	60.000	4 kelompok	4 kelompok	BLH			
1	08	1	08	0 1	1 7	20	Penanganan Daerah Rawan Bencana dengan pembuatan senderan / talud	Pembuatan senderan untuk kawasan mata air	1 paket	1 paket	100.005	1 paket	93.936	1 paket	105.000	1 paket	110.000	1 paket	120.000	6 paket	BLH				
1	08	1	08	0 1	1 7	25	Penyelamatan dan pengendalian kawasan mata air ( konservasi )	Jumlah bibit tanaman penghijauan, jumlah desa menyusun RPJM Desa konservasi	22.850 bibit, 15 desa	14.000 bibit, 5 desa	116.000	14.000 bibit, 5 desa	116.000	20.000 bibit, 5 desa	187.475	25.000 bibit, 5 desa	191.500	35.000 bibit	210.000	151.850, 35 desa	BLH				
1	08	1	08	0 1	1 7	27	Pengendalian kerusakan lingkungan dengan pembuatan sumur resapan/biopori (DAK)	Jumlah unit alat bor biopori, jumlah lubang biopori dan jumlah sumur resapan	10 alat, 20 sumur resapan	28 alat, 60 lubang, 25 sumur resapan	113.475	25 alat, 60 lubang, 21 sumur resapan	106.292	28 alat, 60 lubang, 25 sumur resapan	110.000	30 alat, 60 lubang, 27 sumur resapan	120.000	32 alat, 62 lubang, 29 sumur resapan	130.000	153 alat, 322 lubang, 127 sumur resapan	BLH				
1	08	1	08	0 1	1 7	30	Penghijauan di lingkungan obyek vital untuk konservasi SD Air (DAK)	Jumlah bibit dan pembuatan taman kota	-	16.300 bibit	54.466	3.500 bibit, 1 taman	48.064	3.700 bibit, 1 taman	53.000	4.000 bibit, 1 taman	55.000	4.300 bibit, 1 taman	58.150	30.800 bibit, 4 taman	BLH				
1	08	0 1	06	0 1	2 4	05	Koordinasi dan Fasilitas Konservasi SDA	Terselenggaranya fasilitas dan koordinasi konservasi	-	1 paket	30.000	1 paket	24.000	1 paket	24.000	1 paket	24.000	1 paket	24.000	1 paket	1 paket	Bappeda			



Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	SKPD Penanggung Jawab	
				2011		2012		2013		2014		2015				
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		SDA														
	Program dan Kegiatan PDAM															
	Program Peningkatan Pelayanan															
	Penambahan kapasitas produksi	Penambahan debit produksi dan peningkatan pelayanan air minum	470 L/dt	30 L/dt	6.802.620	-	-	80 L/dt	8.974.000	-	-	-	-	580 L/dt	PDAM	
	Penambahan kapasitas produksi pendampingan	Penambahan debit produksi dan peningkatan pelayanan air minum	470 L/dt	30 L/dt	658.420	-	-	-	-	-	-	-	-	580 L/dt	PDAM	
	Penambahan Sambungan Rumah (SR)	Peningkatan jumlah jiwa yang terlayani air bersih PDAM	40.475 SR	1.560 SR	2.340.000	4.395 SR	6.592.500	5.758 SR	8.637.000	5.000 SR	7.500.000	5.000 SR	7.500.000	62.188 SR	PDAM	
	Pengurangan Kehilangan/Kebocoran Air	Penurunan prosentase angka kebocoran air	29,56 %	0,50%	1.647.903	0,50 %	3.146.457	4 %	2.997.673	2 %	1.128.258	2 %	1.128.258	20,56 %	PDAM	
	Program Pelestarian Sumber															
	Penyelamatan dan Pelestarian Sumber Mata Air (Konservasi)	Penanaman bibit pohon di kawasan mata air	17.158 btg	25.265 btg	92.496	8.660 btg	48.775,5	8.660 btg	48.775,5	8.660 btg	48.775,5	8.660 btg	48.775,5	77.063 btg	PDAM	

## **BAB 4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

---

### **4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL**

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD-AMPL dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Kepala SKPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
- 2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- 3) Kepala SKPD melalui Tim Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;
- 4) Kepala Bappeda kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Penyusun RAD AMPL;
- 5) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian /penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh Kepala SKPD;
- 6) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
- 7) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan tahunan daerah kepada Bupati.

#### **A. Materi Pemantauan dan Evaluasi**

- A.1 Visi dan misi SKPD kabupaten berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah;
- A.2 Strategi dan kebijakan strategi SKPD kabupaten berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
- A.3 Rencana program, kegiatan SKPD kabupaten berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
- A.4 Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD Kabupaten berpedoman pada indikasi rencana oprogram prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah;

A.5 Indikator kinerja SKPD kabupaten berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan

A.6 Pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.

## **B. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan dilakukan dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Juli dan Desember.

## **C. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi**

C.1 Kepala SKPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD kabupaten;

C.2 Kepala Bappeda kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategis SKPD kabupaten.

## **D. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, peran DPRD adalah sebagai berikut:

D.1 DPRD mempunyai fungsi pengawasan;

D.2 Fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;

D.3 Mengadakan pembahasan rutin (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL

D.4 Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL.

D.5 Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk mengembangkan kapasitas BPSPAMS, pemeliharaan, dan perluasan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.

## 4.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

Tabel 23 Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL 2011-2015

No	Sasaran AMPL 2015	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target RAD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					SKPD						
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)						
					K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp					
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Predikat kinerja																											
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																											
Faktor penghambat:																											
Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya:																											

Catatan: K = kinerja; Rp = Anggaran  
 Format disusun sesuai format evaluasi Hasil RPJMD dalam Permendagri N0 54/2010



## **BAB 5. PENUTUP**

---

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman seluruh pihak bahwa permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan merupakan masalah kita bersama dan harus mendapatkan prioritas penanganan yang memadai serta ditunjang dengan biaya yang cukup.

Untuk itu diperlukan komitmen semua pihak untuk dapat mengarusutamakan AMPL. Manifestasi dari pengarusutamaan AMPL ini terwujud dalam keseriusan penganggaran program-program AMPL oleh Pemerintah di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat serta sumber-sumber pendanaan selain dari Pemerintah. Dengan adanya RAD-AMPL ini setidaknya-tidaknya sudah ada komitmen di depan untuk penanganan AMPL, selanjutnya diperlukan keseriusan seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal program-program yang telah direncanakan dalam dokumen RAD-AMPL ini.

Akhirnya dengan iringan doa kepada Allah SWT, semoga kita semua senantiasa diberikan petunjuk dan kekuatan untuk dapat berbuat maksimal dalam melayani masyarakat khususnya untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat di Kabupaten Magelang.

**Lampiran**  
**RENCANA AKSI DAERAH**

**AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011 - 2015**

**Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup**

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
TARGET 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015																
	Indikator MDGs	1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan perdesaan) 2. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar (perkotaan dan perdesaan)														
<b>1</b>	<b>Program promosi kesehatan &amp; pemberdayaan masyarakat</b>															
	1.1 Advokasi & sosialisasi instansi pelayanan kesehatan	1. Terlaksananya advokasi dan sosialisasi refitalisasi instansi kesehatan	29 Puskesmas	29 Puskesmas	29 Puskesmas	29 Puskesmas	29 Puskesmas	29 Puskesmas	29 Puskesmas	100.000	110.000	115.000	115.000	120.000	APBD KAB	DINKES
	1.2 Pengembangan media kesehatan	1. Tersedianya sarana pengembangan promosi kesehatan	29 Puskesmas	29 Puskesmas	29 Puskesmas	29 Puskesmas	29 Puskesmas	29 Puskesmas	29 Puskesmas	100.000	135.000	100.000	100.000	100.000	APBD KAB	DINKES
	1.3 Penyuluhan kesehatan	1. Terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan	29 Puskesmas	29 Puskesmas	29 Puskesmas	29 Puskesmas	29 Puskesmas	29 Puskesmas	29 Puskesmas	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000	APBD KAB	DINKES
	1.4 Pertemuan koordinasi program promosi kesehatan	1. Terlaksananya kegiatan koordinasi program promkes	29 Puskesmas	29 Puskesmas	29 Puskesmas	29 Puskesmas	29 Puskesmas	29 Puskesmas	29 Puskesmas	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	APBD KAB	DINKES
	1.5 Evaluasi pelaksanaan desa siaga	1. Akselerasi	372 Ds./Kel	372 Ds./Kel	372 Ds./Kel	372 Ds./Kel	372 Ds./Kel	372 Ds./Kel	372 Ds./Kel	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	APBD KAB	DINKES
	1.6 Pembinaan kader posyandu	1. Revitalisasi posyandu	2291 posyandu	2291 posyandu	2291 posyandu	2291 posyandu	2291 posyandu	2291 posyandu	2291 posyandu	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	APBD KAB	DINKES
	1.7 Pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	1. Peningkatan peran serta masyarakat	2291 UKBM	2291 UKBM	2291 UKBM	2291 UKBM	2291 UKBM	2291 UKBM	2291 UKBM	100.000	100.000	50.000	50.000	100.000	APBD KAB	DINKES

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR / OUTPUT		CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015			
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	(UKBM)																	
2	Program pengembangan lingkungan sehat																	
	2.1	Pembangunan sarana jamban keluarga	1.	Pembangunan Sarana jamban Keluarga	808.792 Jamban	400 Jamban	400 Jamban	400 Jamban	400 Jamban	400 Jamban	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	APBD KAB	DINKES	
	2.2	PAMSIMAS	1	Meningkatnya kesehatan, perilaku higienis dan pelayanan sanitasi.	60,20%	60,50 %	70,58 %	75,44 %	80,10 %	85 %	50.000	50.000	75.000	75.000	80.000	APBN	DINKES	
	2.3	PAMSIMAS (pendampingan)	1.	Meningkatnya kesehatan, perilaku higienis dan pelayanan sanitasi.	60,20%	60,50 %	70,58 %	75,44 %	80,10 %	85 %	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	APBD KAB	DINKES	
	2.4	Pengawasan & pembinaan sanitasi tempat-tempat umum	1.	Sanitasi di tempat umum		1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	6.000	8.000	10.000	10.000	10.000	APBD PROV	DINKES	
	2.5	Penyehatan lingkungan dan pengendalian vector lalat di TPA/S	1.	Pengendalian vector lalat di TPA/S	2 TPA dan 5 TPS	2 TPA dan 5 TPS	2 TPA dan 5 TPS	2 TPA dan 5 TPS	2 TPA dan 5 TPS	2 TPA dan 5 TPS	45.000	50.000	55.000	60.000	60.000	APBD KAB	DINKES	
3	Program pengembangan, pengelolaan & konservasi sungai, danau, & sumber daya air lainnya																	
	3.1	Inventarisasi & pengelolaan data & informasi CAT, pemanfaatan air tanah & SG	1.	Tersusunnya data & informasi geohidrologi daerah sekitar mata air daerah imbuhan	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	152.000	75.000	100.000	100.000	100.000	APBD KAB	DPU	
	3.2	Konservasi sumberdaya air tanah	1.	Pembuatan sumur, embung resapan air tanah	1 Paket	1 Paket	2 Paket	4 Paket	3 Paket	3 Paket	106.327	100.000	200.000	150.000	150.000	APBD KAB	DPU	
4	Program pengembangan, kinerja, pengelolaan air minum dan air limbah																	
	4.1	Pembangunan SPAM (DAK)	1.	Terbangunnya SPAM		8 paket	9 paket	9 paket	10 paket		1.322.591	3.600.000	3.500.000	3.500.000		APBD KAB	DPU	
	4.2	SPAM	1	Terbangunnya Jaringan Air Minum		17 desa	17 desa	17 desa	17 desa		2.954.273	2.954.273	2.954.273	2.954.273		APBN	DPU	
	4.3	Pamsimas	1	Penyediaan air minum dan sanitasi	36 Desa	15 desa	14	15	15	15 Desa	2.887.5	2.695.	2.887.50	2.887.50	2.887.500	APBN	DPU	



NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIA N 2010	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAK SANA	KETERAN GAN	
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		di daerah miskin dan rawan air			Desa	Desa	Desa				00	000	0	0			
	4.4	Pamsimas Replikasi, DDUB, dan BOP	1	Penyediaan air minum dan sanitasi di daerah miskin dan rawan air	2 Desa	2 desa	1 Desa	2 Desa	2 Desa	1 Desa	1.065.000	790.000	1.065.000	1.065.000	790.000	APBD KAB	DPU
	4.5	SPAM di daerah berpenduduk miskin dan akses air minum sangat kurang	1	Terbangunnya SPAM	1 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	225.000	625.000	675.000	750.000	825.000	APBD PROV	DPU
	4.6	Sanitas Lingkungan berbasis masyarakat (SLBM/DAK)	1	Terbangunnya MCK dan IPAL Komunal	4 Lokasi	6 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	3.447.100	2.318.066	2.318.066	2.318.066	2.318.066	APBD KAB	DPU
	4.7	Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI)	1	Terbangunnya Sanitasi di Perkotaan			6 lokasi	6 lokasi	6 Lokasi			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	APBN	DPU
	4.8	Updateting dan evaluasi penyusunan data potensi air baku dan daerah pelayanan	1	Tersusunnya buku data potensi air baku dan daerah pelayanan	1 Paket	1 Paket	1 paket	1 paket	1 Paket	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	APBD KAB	DPU
5.	Program pembangunan infrastruktur pedesaan																
	5.1	PIPP	1	Jumlah Desa / Kelurahan	24 Desa	35 Desa	25 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	5.900.000	4.350.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	APBN	DPU
	5.2	PPIP (pendamping)	1.	Jumlah desa/ kelurahan	24 Desa	35 Desa	25 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	112.500	125.000	125.000	125.000	125.000	APBD KAB	DPU
	5.3	ND / PLP - BK	1	Jumlah Kokasi	4 Desa	5 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa		5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	APBN	DPU
	5.4	ND/PLP-BK (pendamping)	1.	Jumlah lokasi	4 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	80.000	182.000	200.000	220.000	220.000	APBD KAB	DPU
	5.5	PNPM Perkotaan (P2KP)	1	Jumlah Lokasi	27 Desa	27 Desa	27 Desa	27 Desa	27 Desa	27 Desa	4.245.000	3.230.000	4.245.000	3.230.000	4.245.000	APBN	DPU
	5.6	PNPM-Perkotaan (pendamping/DDUB+BOP)	1	Jumlah paket pendampingan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	APBD KAB	DPU
	5.7	Bantuan keuangan dari gubernur untuk penataan lingkungan	1.	Jumlah lokasi	10 Lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		APBD PROV	DPU
	5.8	Bantuan keuangan dari gubernur untuk penataan lingkungan (pendamping)	1.	Jumlah lokasi	10 Lokasi	4 Lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi		75.000	75.000	100.000	100.000		APBD KAB	DPU

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR / OUTPUT		CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015			
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	Pembangunan infrastruktur perkotaan																	
	6.1	Penataan lingkungan di daerah kumuh perkotaan	1.	Lokasi		2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi		400.000	400.000	400.000	400.000		APBD PROV	DPU	
			2.								600.000	600.000	600.000	600.000		APBN	DPU	
	6.2	Pembangunan jalan poros & akses masuk ke kav. Perum/pemukiman	1.	Lokasi		1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi		1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000		APBN	DPU	
7.	Program lingkungan sehat perumahan																	
	7.1	Fasilitasi dan koordinasi Peningkatan Kinerja AMPL	1	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi di bidang AMPL	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	59.000	160.000	50.000	50.000	50.000	APBD KAB	BAPPEDA	
	7.2	Pembangunan jalan poros & akses masuk ke kawasan perum / permukiman.	1.	Lokasi		1 lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi			175.000	175.000	175.000		APBD KAB	DPU		
8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan																	
	8.1	Penyediaan sarana & prasarana pengelolaan persampahan	1	Terwujudnya kebersihan jalan dan lingkungan	7 Kec.	7 Kec.	7 Kec.	7 Kec.	7 Kec.	7 Kec.	457.103	281.068	678.936	425.000	500.000	APBD KAB	DPU	
	8.2	Pembuatan tempat pembuangan sampah sementara (TPS)	1	Tersedianya tempat pembuangan sampah sementara ( TPS ) yang memadai		4 TPS			6 TPS		99.542			200.000		APBD KAB	DPU	
	8.3	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana & prasarana kebersihan	1	Terpeliharanya kendaraan dinas angkutan sampah	8 truk 5 kend roda-3 2excavator 1 loader	idem	idem	idem	idem	idem	834565	786.547	1.000.000	1.100.000	1.250.000	APBD KAB	DPU	
	8.4	Pemeliharaan kebersihan kota Muntilan	1	Terpeliharanya kebersihan kota Muntilan	1 Kec.	1 Kec.	1 Kec.	1 Kec.	1 Kec.	1 Kec.	250.044	246.233	469.655	550.000	650.000	APBD KAB	DPU	
	8.5	Rehab TPA	1	Tersedianya tempat TPA yang memadai	2 TPA				1 TPA					150.000		APBD KAB	DPU	
	8.6	Pembangunan kantor kemandoran	1	Tersedianya kantor kemandoran yang memadai	3 Kantor			1 Kantor	1 Kantor				150.000	150.000		APBD KAB	DPU	

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR / OUTPUT		CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015			
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.7	Pengadaan sarana angkutan sampah	1	Tersedianya sarana angkutan sampah yang memadai	8 truk 5 kend roda-3 2 excavat or 1 loader 10 containe r		2 contain er		2 truk	3 truk		50.000		1.000.00 0	1.500.000	APBD KAB	DPU	
	8.8	Pengadaan bak/ kotak sampah	1	Tersedianya bak/kotak sampah yang memadai				80 buah	80 buah	100 buah			100.000	100.000	125.000	APBD KAB	DPU	
	8.9	Pengadaan Tanah	1	Tersedianya lahan TPA yang memadai				1 Lokasi					5.000.00 0			APBD KAB	DPU	
	8.10	Monitoring evaluasi dan laporan	1	Tersedianya data volume sampah				1 bk	1 bk	1 bk			25.000	25.000	25.000	APBD KAB	DPU	
9	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa																	
	9.1	Pengadaan aspal & semen untuk desa	1	Lokasi	21 Kec	21 Kec	21 Kec	21 Kec	21 Kec	21 Kec	5.000.0 00	5.000. 000	5.000.00 0	5.000.00 0	5.000.000	APBD KAB	DPU	
10	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak																	
	10.1	Pemberdayaan Masyarakat berperspektif gender	1	Peningkatan peran perempuan	10 Kec.	2 Kec	2 Kec	2 Kec	2 Kec	2 Kec	35.000	35.000	40.000.	79.000	79.000	APBD KAB	BPMP KB	
11	Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan																	
	11.1	Pemberdayaan peran institusi masyarakat pedesaan	1	Terselenggaranya evaluasi dan advokasi ketahanan keluarga	21 Kec.	21 Kec.	21 Kec.	21 Kec.	21 Kec.	21 Kec.	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	APBD KAB	BPMP KB	
12	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan																	
	12.1	Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat	1.	Terwujudnya KPM yang profesional	50 Desa	50 Desa	50 Desa	50 Desa	50 Desa	50 Desa	20.000	20.000	25.000	25.000	30.000	APBD KAB	BPMPKB	
	12.2	Fasilitasi penguatan kelembagaan desa	1.	Pelatihan anggota kelembagaan desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	APBD KAB	BPMPKB	
	12.3	Penguatan kelembagaan Pamsimas	1.	Terbinanya BP-SPAMS			14 Desa	14 Desa	14 Desa	14 Desa		30.000	35.000	35.000	40.000	APBD KAB	BPMPKB	
13	Program penanggulangan kemiskinan																	

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN	
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	13.1	PNPM-MP	1	Peningkatan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	19 Kec	19 Kec	19 Kec	19 Kec	19 Kec	60.725.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000	APBN	BPMP KB		
	13.2	PNPM-MP (Pendamping)	1	Peningkatan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	19 Kec	19 Kec	19 Kec	19 Kec	19 Kec	4.400.000	1.425.000	457.000	450.000	550.000	APBD KAB	BPMP KB		
	13.3	PNPM-MP ( Biaya Operasional )	1	Peningkatan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	19 Kec	19 Kec	19 Kec	19 Kec	19 Kec	430.000	450.000	700.000	750.000	750.000	APBD KAB	BPMP KAB		
	13.1	Fasilitasi pelaksanaan pembangunan perumahan masy. Kurang mampu (Biaya operasional)	1.	Peningkatan kualitas perumahan masyarakat.	108 Unit	24 Unit	386 Unit	200 Unit	250 Unit	250 Unit	84.005	332.812	35.000	40.000	40.000	APBD KAB	BPMPKB	
14	Program perlindungan & konservasi SDA																	
	14.1	Puncak penghijauan & konservasi alam nasional	1.	Jumlah kelompok penerima penghargaan bagi penyelamat lingkungan	4 Kelompok	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	20.000	20.000	40.000	50.000	60.000	APBD KAB	BLH	
	14.2	Penanggulangan daerah rawan bencana dengan pembuatan senderan/talut	1.	Pembuatan senderan untuk kawasan mata ir	1 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100.005	93.936	100.005	110.000	120.000	APBD KAB	BLH	
	14.3	Penyelamatan & pengendalian kawasan mata air (konservasi)	1.	Pengadaan bibit tanaman penghijauan, jumlah desa menyusun RPJM Desa konservasi	22.850 bibit; 15 Desa	14.000 bibit 5 Desa	14.000 bibit 5 Desa	20.000 bibit 5 Desa	25.000 bibit 5 Desa	35.000	116.000	116.000	187.475	191.500	210.000	APBD KAB	BLH	
	14.4	Pengendalian kerusakan lingkungan dengan pembuatan sumur resapan / biopori (DAK)	1	Jumlah unit alat bor biopori, jumlah lubang biopori dan jumlah sumur resapan	10 alat 20 sumur resapan	28 alat 60 lbng 25 smr	25 alat 60 lbng 21 smr	28 alat 60 lbng 25 smr	30 alat 60 lbng 27 smr	32 alat 62 lbng 29 smr	113.475	106.292	110.000	120.000	130.000	APBD KAB	BLH	
	14.5	Penghijauan dilingkungan obyek vital untuk konservasi SD Air (DAK)	1	Jumlah bibit dan pembuatan taman kota		16.300 bibit	3500 bibit	3700 bibit	4000 bibit	4300 bibit	54.466	48.064	53.000	55.000	58.150	APBD KAB	BLH	
	14.6	Koordinasi dan Fasilitasi Konservasi SDA.	1	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi konservasi SDA.		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000	APBD KAB	BLH	
	PROGRAM DAN KEGIATAN PDAM																	

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR / OUTPUT		CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015			
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	PROGRAM Peningkatan PELAYANAN																	
	15.1	Penambahan Kapasitas Produksi	1	Penambahan debit produksi dan peningkatan pelayanan air minum	470 lt/det	30 Lt/ dt		80 Lt/dt			6.802.620		8.974.000			APBN	PDAM	
	15.2	Penambahan Kapasitas Produksi pendampingan	1	Penambahan debit produksi dan peningkatan pelayanan air minum	470 Lt/dt	30 Lt/dt					658.420					PDAM	PDAM	
	15.3	Penambahan Sambungan Rumah ( SR )	1	Peningkatan Jumlah Jiwa yang terlayani air bersih PDAM	40.475 SR	1560 SR	4395 SR	5758 SR	5000 SR	5000 SR	2.340.000	6.592.500	8.637.000	7.500.000	7.500.000	PDAM	PDAM	
	15.4	Pengurangan kehilangan / kebocoran air	1	Penurunan prosentase angka kebocoran air	29,56 %	0,50 %	0,50 %	4 %	2 %	2 %	1.647.903	3.146.457	2.997.673	1.128.258	1.128.258	PDAM	PDAM	
16	Program Pelestarian Sumber																	
	16.1	Penyelamatan dan pelestarian sumber mata air (konservasi)	1	Penanaman bibit pohon di kawasan mata air	17.156 Btg	25.265 Btg	8.660 Btg	8.660 Btg	8.660 Btg	8.660 Btg	92.496	48.775	48.775	48.775	48.775	PDAM	PDAM	

BUPATI MAGELANG,  
 ttd  
 ZAENAL ARIFIN